

## BAB III

### KEBIJAKAN PROPAGANDA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG

#### 3.1 Sejarah Awal Propaganda Jepang

Menjelang perang dunia kedua, tepatnya pada tahun 1930-an terjadi serangkaian peristiwa dan kemelut politik yang mengakibatkan menguatnya nasionalisme Jepang yang secara ekstrem menuju ultranasionalisme. Kemelut politik ini secara langsung juga memengaruhi kekuasaan militer atas pemerintahan sipil, sehingga menjadi landasan menuju era militerisme Jepang yang diwujudkan dalam bentuk ultranasionalisme. Bertepatan dengan itu terdapat sebuah konsep *total war*, sebuah konsep yang sedang naik daun pada periode itu. Dalam konsep ini Amy Elizabeth Robinson berpendapat setidaknya terdapat empat dimensi dalam *total war*, yaitu (1). Mobilisasi; (2). Penolakan atas kompromi; (3). Mengaburkan peran tentara dan warga sipil; dan (4). Kendali total atas masyarakat.<sup>103</sup> Dimensi ini juga memengaruhi kebijakan yang diambil sebelum pecahnya perang dunia kedua, tepatnya kebijakan mengenai propaganda yang bisa digunakan untuk mobilisasi total dan mengendalikan masyarakat.

Propaganda bukan merupakan langkah baru yang dilakukan Jepang, sehingga dalam perkembangannya mengalami beberapa dinamika sebelum secara resmi dilaksanakan dalam Perang Asia Timur Raya. Perlu diketahui propaganda dan media massa merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, begitu juga dengan propaganda di Jepang.<sup>104</sup> Propaganda di Jepang terlahir dari hasil berkembangnya

---

<sup>103</sup> Amy Elizabeth Robinson, "Total War," *Encyclopedia Britannica*, 2023, <https://www.britannica.com/topic/total-war>. Diakses pada: 10 September 2023.

<sup>104</sup> Perkembangan jaringan komunikasi internasional dan media massa menjadi salah satu faktor pemicu peningkatannya. Lihat: Tomoko Akami, "Japan's New Empire and Dōmei News

budaya massa dan konsumsi media publik dari periode Demokrasi *Taishō* dan periode-periode sebelumnya. Sebagian masyarakat Jepang sudah menggunakan media massa untuk mendapatkan informasi, sehingga secara tidak langsung propaganda sebenarnya telah dilakukan.

Melalui hal itu sebenarnya mengindikasikan bahwa propaganda secara sadar atau tidak sudah menjadi bagian dari masyarakat Jepang itu sendiri. Namun pembatasan periode propaganda yang berkaitan dengan perang Asia Timur Raya dapat ditelusuri sejak tahun 1930-an. Konsep *kyōka movement*,<sup>105</sup> merupakan awal dari propaganda itu sendiri, dengan berdasarkan pada bujukan moral. Jelasnya *Kyōka* propaganda dapat diartikan sebagai sebuah tindakan kekaisaran untuk menghubungkan keinginan rakyat dengan keinginan bangsanya berdasarkan pada bujukan moral konfusianisme.<sup>106</sup> Setidaknya propaganda dipandang sebagai sarana psikologi-sosial yang dapat membantu Jepang mencapai tujuannya, serta propaganda digunakan untuk mengubah masyarakat menjadi partisipan aktif dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jepang. Dalam prosesnya juga hubungan antara keinginan rakyat dan keinginan kekaisaran ini berkenaan langsung dengan kegiatan ekspansionisme yang dilakukan Jepang, sehingga corak ekspansionisme ini dapat disebut sebagai *kyōka* propaganda.

---

Agency in Occupied Southeast Asia,” *The Asia-Pacific Journal* Vol. 13, no. 1 (2015), <https://apjif.org/2015/12/1/Tomoko-Akami/4246.html>. p. 1.

<sup>105</sup> *Kyōka movement* merupakan gerakan penguatan nasionalisme pada penduduk Jepang berdasarkan pada bujukan moral, dengan harapan penduduk bisa mengidentifikasi diri sebagai suatu kesatuan dalam negara Jepang. Gerakan itu telah dimulai sejak periode *Meiji* sampai periode *Shōwa* (1880an-1930an). Lihat: Barak Kushner, *The Thought War: Japanese Imperial Propaganda* (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2007). p. 22.

<sup>106</sup> *Ibid.*

Mengenai karakter dari propaganda yang ingin dibangun oleh Jepang pada tahun 1930an ini berkaitan dengan citra yang ingin dibangun Jepang sebagai negara modern.<sup>107</sup> Dalam prosesnya, Jepang membangun citra diri sebagai negara modern dilakukan melalui tahapan panjang sejak restorasi *Meiji*, dan berhasil diwujudkan secara sempurna pada periode *shōwa*. Makna citra diri sebagai negara modern dapat diartikan sebagai hasil perjuangan dan jerih payah bangsa Jepang. Sehingga Jepang sangat berkeinginan diakui sebagai bangsa modern oleh bangsa-bangsa lain. Maka penggunaan propaganda merupakan sebuah langkah yang dilakukan Jepang untuk membentuk persepsi sebagai negara modern. Dasar propaganda ini tetap dipertahankan setidaknya sampai dengan periode tahun 1940-an, walaupun dengan ditambah beberapa aspek penting yang menyertainya.

Penggunaan propaganda untuk kepentingan perang baru mulai berkembang pasca aneksasi terhadap Manchuria pada tahun 1931.<sup>108</sup> Peristiwa itu dianggap sebagai faktor pemicu dalam penggunaan propaganda secara luas oleh Kekaisaran Jepang. Salah satunya dapat dilihat melalui artikel karya Jenderal Araki, Menteri Urusan Perang, pada bulan April 1932. Judul *The Call Of Japan in the Showa Period* (Seruan Jepang pada Periode *Showa*), memuat ajakan untuk Jepang harus

---

<sup>107</sup> Ibid., hlm. 15.

<sup>108</sup> *Mukden Incident* merupakan peristiwa yang mengawali aneksasi Jepang di Manchuria. Menjelang abad ke-20 intervensi Jepang di Manchuria hanya sebatas untuk menjaga koloni Korea. Namun, mengalami perubahan setelah terjadinya Mukden Incident, saat itu malam tanggal 18 September 1931 Lieutenant Suemori Kawamoto salah satu dari bagian dari unit garisson ke 29 Regiment Infanteri Jepang meledakan dinamit berkekuatan kecil dekat dengan rel kereta api, dan tepat saat kereta datang ledakan itu sebenarnya sangat kecil dan rel kereta juga baik saja. Kendati demikian, Tentara Kekaisaran Jepang malah menganggap itu sebagai serangan terhadap mereka dari penduduk China, selanjutnya Jepang melakukan invasi secara penuh ke Manchuria. Lihat: John Swift, "Mukden Incident," *Encyclopedia Britannica*, 2023, <https://www.britannica.com/event/MukdenIncident>. Diakses pada 03 Oktober 2023.

mengikuti *Imperial Way*<sup>109</sup> untuk mengangkat bangsa Yamato, dan untuk menyelamatkan Asia Timur serta dunia. Jenderal Araki mengakhiri artikelnya dengan suatu penekanan bahwa misi bangsa Jepang adalah menyebarluaskan doktrin *Imperial Way* di seluruh lautan dan dunia.<sup>110</sup> Melihat tulisan tersebut sebenarnya sudah mencerminkan langkah propaganda Jepang, dengan menyatakan dirinya sebagai penyelamat dan pembebas bangsa Asia. Diksi tersebut juga dipilih dengan sempurna menyembunyikan maksud dan tujuan asli dari Jepang sendiri untuk menguasai wilayah Asia. Konsep penyelamat juga merupakan penegasan dari konsep moral dalam *kyōka* propaganda, selain itu, dalam propaganda ini juga menekankan Jepang sebagai negara modern yang akan memimpin asia.

Propaganda sendiri dipandang sebagai interaksi antara negara dengan masyarakat, sehingga perannya dalam perang begitu sangat penting. Oleh karena itu, perkembangan propaganda yang begitu dinamis menjadi salah satu hal yang diperhatikan pemerintah Jepang. Dalam perkembangannya propaganda Jepang lahir

---

<sup>109</sup> *Imperial Way* atau Jalan Kekaisaran memiliki dua makna, pertama konsep *Imperial Way* (*Kōdōshugi*) yang dapat diartikan sebagai konsep yang mempercayai bahwa bangsa Yamato/Jepang merupakan bangsa utama dan bangsa pilihan, sekaligus sebagai pemimpinnya. Kedua *Imperial Way* (*Kodo-ha*) merupakan salah satu fraksi dalam tentara angkatan darat Jepang, fraksi ini merupakan salah satu fraksi yang memiliki ideologi ekspansionisme, militeristik, totalitarian, dan ultranasionalis, sehingga dalam praktiknya kelompok ini mendukung ekspansi wilayah Jepang ke Utara (*Nanshin Hokushin-ron*, bertahan di Selatan dan menyerang di Utara). Kedua makna tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, bisa dikatakan *Kōdōshugi* merupakan dasar ideologisnya, dan *Kodo-ha* merupakan pergerakannya. Lihat: James B. Crowley, "Japanese Army Factionism in Early 1930's," *The Journal of Asian Studies* Vol. 21, no. 3 (1962): 309–326, <https://www.jstor.org/stable/2050676>, p. 313-314.

<sup>110</sup> Artikel itu menjelaskan, "*The Japanese Empire, in its own and other eyes, the leader of East Asia and with the power to be so, whose call is Kodo or the Imperial Way, to spread out and save oppressed countries, cannot stand aside any longer and look on inactive.*" Adapun terjemahannya, "Kekaisaran Jepang, dalam sudut pandangnya dan sudut pandang orang lain, merupakan pemimpin Asia Timur dan dengan kekuatan yang dimiliki itu, disebut dengan nama *Kodo* atau Jalan Kekaisaran, dalam rangka memperluas dan melakukan penyelamatan negeri-negeri tertindas, kita tidak dapat lagi tinggal diam dan hanya melihat tanpa melakukan apapun." Lihat: Robertson Eric, *The Japanese File: Pre-War Japanese Penetration in Southeast Asia* (London: Heinemann Educational Book Ltd., 1979), p. 13.

dan disempurnakan melalui percobaan berulang-ulang, hingga pemerintah Jepang menemukan formula yang tepat mengenai propagandanya. Bahkan pemerintah Jepang dengan serius mempelajari propaganda dari Inggris, yang dianggapnya sebagai guru pertama dari propaganda modern.<sup>111</sup> Pemerintah melalui departemen luar negeri sangat serius berusaha mempelajari teknik propaganda Inggris pada perang dunia pertama, buku-buku dan karya-karya Inggris berusaha diterjemahkan kedalam bahasa Jepang.

Pertengahan tahun 1930an mengawali penggunaan kata *senden* sebagai propaganda modern yang berdasarkan pada teknologi dan ilmu pengetahuan. Pergeseran makna propaganda dari *kyōka* propaganda, menuju *senden* dapat diartikan secara sederhana sebagai perkembangan sistem propaganda, tanpa menghilangkan sifat ekspansionisme yang dimilikinya. Makna *senden* sebagai propaganda dapat diartikan sebagai interaksi antara negara dengan rakyat yang tidak dapat dipaksakan. Penggunaan terminologi *senden* ini juga berkenaan langsung dengan penggunaan teknologi, teknik dan metode sebagai propaganda modern. Periode tahun 1930an memang menjadi periode negara-negara Eropa mulai melirik propaganda, dan hal ini juga diikuti oleh pemerintah Jepang untuk mengembangkan segala hal penunjang propogandanya.

Kendati demikian terdapat perbedaan antara konsep propaganda modern yang dianut oleh beberapa negara-negara Eropa dengan propaganda *senden* yang dimiliki Jepang. Khususnya mengenai konotasi negatif dalam propaganda, jika dalam propaganda Eropa propaganda identik dengan kebohongan, namun dalam

---

<sup>111</sup> Kushner, *The Thought War: Japanese Imperial Propaganda. Op.cit.*, p. 22.

terminologi *senden* propaganda tidak dipandang sebagai penyebaran kepalsuan atau kebohongan. Melainkan dalam perspektif Jepang propaganda dipandang sebagai menyebarkan fakta-fakta yang dapat dipercaya, serta digunakan untuk menciptakan situasi dan pemahaman yang menuntun masyarakat untuk mengikuti kebijakan tertentu yang diinginkan.<sup>112</sup> Propaganda dalam pandangan Jepang memiliki tujuan untuk mendorong rakyat menyelesaikan permasalahannya berdasarkan inisiatifnya sendiri, melalui penanaman teguh pada nilai-nilai dan sikap budaya pada masyarakat dengan harapan akan timbul kesadaran bawaan dan sukarela untuk membantu kepentingan negaranya.

Seperti yang disinggung sebelumnya, terdapat penggunaan propaganda untuk kepentingan militer. Dalam perspektif Jepang penggunaan propaganda ini erat sekali kaitannya dengan kepentingan nasional, dan ekspansi militer menjadi salah satu kepentingan utama nasional Jepang. Sehingga selama perkembangan *kyōka* menuju *senden* propaganda, terdapat keterkaitan satu sama lain utamanya mengenai arah tujuan propaganda Jepang. Hal itu dapat terlihat dari salah satu konsep *kyōka* propaganda berupa tanggung jawab moral Jepang masih bertahan sampai tahun 1940an. Penggunaan propaganda juga digunakan selama ekspansi militer Jepang pada perang Sino-Japan II pada 1937, sejalan dengan itu mulai diperkenalkan sebuah pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya *shisōsen* atau perang pemikiran sebagai bagian dari propaganda modern, sejalan dengan perkembangan perang habis-habisan dengan China.

---

<sup>112</sup> Ibid. p. 25.

Propaganda perang pada tahun 1937 menekankan pada pemerintah Jepang harus memberikan edukasi dan informasi tentang perang dengan China sehingga timbul kesadaran untuk berperang. Pemerintah dan militer berusaha mengajak masyarakat untuk menikmati, mencerna, dan menanggapi propagandanya, sehingga dalam perspektif ini menghilangkan stigma propaganda negatif propaganda.<sup>113</sup> Melalui ini juga menjelaskan adanya kerja sama antara pemerintah sipil dan militer untuk saling berkoordinasi menunjang tercapainya tujuan propaganda.

Koordinasi itu berusaha dibangun dengan membentuk badan khusus dengan kewenangan utama mengelola propaganda, walaupun begitu pemerintah Jepang tidak pernah berhasil membuat sebuah badan propaganda itu. Badan propaganda yang dibuat pemerintah Jepang hanya bersifat sebagai koordinator antara beberapa kementerian.<sup>114</sup> Selain itu, antara kementerian satu dengan yang lainnya juga terjadi serangkaian persaingan untuk membentuk sebuah badan propaganda mandiri yang efektif demi menjangkau informasi yang disampaikan dapat diterima masyarakat Jepang.

Rencana membuat badan khusus yang mengelola propaganda pernah dilakukan selama paruh waktu 1930-an. Dibawah grup riset dalam kementerian pada tanggal 10 Januari 1935 juga pernah mengusulkan sebuah badan sentral yang akan mengkoordinasikan upaya propaganda. Dengan enam tugas utama termasuk didalamnya perencanaan terpadu upaya propaganda, analisis propaganda

---

<sup>113</sup> Ibid.

<sup>114</sup> Salah satu koodinasi antara beberapa kementerian adalah Kementerian Telekomunikasi dan Kementerian Luar Negeri adalah terciptanya Kantor Berita Dōmei (Dōmei Tsūshin) untuk memberikan informasi mengenai Jepang ke luar negeri. Jepang berusaha untuk membuat citra baik di internasional, tampaknya Jepang sangat takut citranya buruk dan musuhnya mendapatkan dukungan dari internasional. Lihat: Ibid., p. 27.

internasional dan lokal, dan penelitian mengenai perang ideologis. Badan ini baru terlaksana pada 25 September 1937, dan mulai terlibat ke dalam kabinet informasi, untuk akhirnya menjadi Dewan Kabinet Informasi.<sup>115</sup> Tugas dari kabinet itu adalah melakukan koordinasi kebijakan propaganda antara beberapa kementerian di pemerintah Jepang. Namun pada praktiknya lembaga ini hanya memiliki status dan kewenangan yang kecil, selain itu dewan kabinet informasi bersifat tidak resmi serta sukarela untuk melakukan koordinasi antar kementerian.

Perang habis-habisan segera terjadi dengan China, dalam hal ini pemerintah dan sipil ikut bekerja sama dalam meningkatkan pengaruh propagandanya. Yokomizo Mitsuseru<sup>116</sup> seseorang dibalik badan propaganda sipil, berbicara pada saat konferensi dengan pemerintah militer Jepang dia menjelaskan konflik dengan China menjadi lebih besar dari yang diperkirakan, sehingga memerlukan sebuah badan utama yang dapat mengkoordinasikan informasi dari dalam dan luar negeri, serta mengelola komunikasi yang berkaitan dengan propaganda dan penerangan. Hasilnya adalah dia ditunjuk sebagai Direktur Kabinet Informasi (*Cabinet Information Office*), dengan kewenangan untuk menyamakan persepsi antara bandan propaganda milik sipil, pemerintah dan militer.

---

<sup>115</sup> Ibid.

<sup>116</sup> Salah satu langkah yang dilakukannya adalah membuat majalah dengan judul laporan mingguan (*Shūhō*) dibawah Komite Kabinet Informasi (*Cabinet Information Comitte*) pada 21 September 1936 dan berhasil dengan gemilang. Majalah itu sebagian besar membahas mengenai berita dan informasi lain dari agensi pemerintah lainnya, sehingga informasi yang dimiliki cukup lengkap. Keberhasilannya juga membuat majalah serupa dan menambahkan variasi foto, dengan nama majalah laporan mingguan dengan foto (*Shashin Shūhō*). .Lihat: Ibid., p. 28.



Gambar 3.1 Poster Propaganda Jepang di Manchuria<sup>117</sup>

Eskalasi konflik antara Jepang dan Republik China semakin bertambah dari waktu ke waktu, bahkan menjelang tahun 1939 Jepang malah menambah konflik bersenjata dengan melawan Mongolia yang dibantu Uni Soviet. Insiden Nomonhan<sup>118</sup> mengawali konflik antara Jepang melawan Mongolia, sayangnya dalam konflik ini untuk pertama kalinya Jepang mengalami kekalahan. Pasca kekalahan ini terjadi perubahan dalam kebijakan luar negeri dan doktrin militer

<sup>117</sup> Tulisan Propaganda Jepang pada posisi kanan atas, berisi tentang memuji kebaikan negara baru, “Manzhou” yang “mengikuti jalan kekaisaran dan menciptakan keharmonisan antar ras.” Kenseishiryōshitsu, *Manshūkoku nihongun sendenbutsu* [1310.61]. Diet National Library, Tokyo. Lihat: Ibid, p.125.

<sup>118</sup> Insiden Nomonhan atau dikenal juga dengan pertempuran Khalkhin Gol, merupakan pertempuran pembuka antara Jepang melawan Mongolia sebelum partisipasi langsung Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pertempuran ini terjadi pada 11 Mei-16 September 1939, antara Jepang dengan Mongolia yang dibantu oleh Uni Soviet. Pada pertempuran ini Jepang merasakan sendiri kuatnya tentara Uni Soviet, sekaligus mengubah strategi pertahanan Jepang untuk berekspansi ke selatan. Lihat: Stuart D Goldman, *Nomonhan, 1939; The Red Army's Victory That Shaped World War II* (Annapolis: Naval Institute Press, 2012), p. 163-164.

yang digunakan Jepang, dari *Nanshin Hokushin-ron* menjadi *Hokushin Nanshin-ron*. Jepang menganggap Uni Soviet di Utara sebagai dinding besi yang tidak dapat ditembus, keinginan Jepang untuk menginvasi Uni Soviet menjadi hilang sepenuhnya dan dengan hal ini juga menjadi akhir dari kebijakan ekspansi ke Utara atau *Nanshin Hokushin-ron*.

Titik balik ini secara langsung mengubah arah kebijakan ekspansionisme Jepang menuju ke arah selatan, tepatnya ke wilayah Asia Tenggara yang masa itu masih dalam belenggu penjajahan bangsa Eropa. Wilayah Selatan dianggap ideal dalam hal sumber daya untuk menopang jalannya perang melawan China, wilayah yang bukan hanya kaya dalam sumber daya alamnya saja melainkan kaya juga atas sumber daya manusianya. Menyadari itu Jepang membutuhkan cara untuk mendapatkan sumber daya di wilayah asia. Langkah awal yang dilakukan adalah mereka butuh 'legitimasi' untuk tindakan ekspansionismenya ke Selatan. Sekali lagi propaganda digunakan sebagai alat penyebaran legitimasinya.

Demi menunjang itu, pada 24 Agustus 1937 mereka membuat program Kampanye Mobilisasi Rohani Nasional (*Kokumin Seishin Sōdōin Undō*) dengan tugas utama untuk memastikan keinginan dan tujuan pemerintah Jepang dapat tersebar ke masyarakat umum dan dapat dipahami dengan baik.<sup>119</sup> Mereka mulai memperkenalkan slogan seperti, *hakkō ichiu* (delapan arah mata angin dalam satu atap), *yamato-damashii* (semangat Jepang) dan *ichioku issin* (seratus juta jiwa dengan satu pikiran) mulai diperkenalkan melalui ceramah, dan pidato. Kendati

---

<sup>119</sup> Kushner, *The Thought War: Japanese Imperial Propaganda*. *Op.cit.*, p. 29.

demikian program ini gagal dalam meraih tujuannya dan kemudian diganti dengan program lain.

Pergerakan Nasional Baru (*Taisei Yokusankai*)<sup>120</sup> dibentuk pada 12 Oktober 1940, sebagai pengganti dari program sebelumnya. Tugas utama dari program ini masih sama dengan program sebelumnya, ditambah dengan tugas untuk melakukan riset dan jejak pendapat masyarakat untuk melihat sejauh mana pesan yang disampaikan itu diterima dengan baik atau tidak.<sup>121</sup> Melalui program ini juga pemerintah bisa mengerti alasan kegagalan pada program sebelumnya. Pada beberapa kasus istilah-istilah atau slogan sering tidak dimengerti oleh masyarakat, dan masyarakat awam juga tidak mengerti mengapa Jepang harus melanjutkan ekspansi wilayahnya.

Untuk menanggulangi itu, mereka selanjutnya membuat evaluasi mengenai kegagalan slogan-slogan yang disampaikan melalui ceramah, dan membuat variasi lain berupa program hiburan, musik, olahraga dan kesenian. Media propaganda dalam hal ini menjadi berkembang menjadi lebih jauh lagi. Langkah propaganda yang diambil Jepang menjadi lebih bervariasi mencakup berbagai bidang dan media, mereka berpandangan bahwa semakin banyak variasi propaganda maka akan membuat semakin mudah dalam menarik simpati dari masyarakat Jepang maupun masyarakat Internasional.

---

<sup>120</sup> Organisasi Pergerakan Nasional Baru (*Taisei Yokusankai*) merupakan satu dari empat biro propaganda yang dibuat oleh Pangeran Konoye pada pertengahan musim panas. Bersama dengan tiga biro lainnya yaitu Cabinet Information Bureau (*Naikaku Jōhōkyoku*), dan dua biro yang ditempatkan di kementerian luar negeri dan markas militer. Lihat: Eric, *The Japanese File: Pre-War Japanese Penetration in Southeast Asia. Op.cit.*, p. 86-87.

<sup>121</sup> Kushner, *The Thought War: Japanese Imperial Propaganda. Loc.cit.*

Masyarakat Jepang sendiri mereka membantu tersebarnya propaganda, dalam hal ini mobilisasi total dilakukan sampai tingkatan lebih rendah. Mereka menggunakan perkumpulan desa (*chōnaikai*) dan rukun tetangga (*tonarigumi*) untuk menyuruh satu sama lain agar percaya pada persatuan, kebaikan dan kejayaan Jepang di Asia.<sup>122</sup> Tindakan mereka juga menumbuhkan tindakan kolektif satu sama lain antara anggota sosial dalam masyarakat. Hampir setiap aspek kehidupan mereka gunakan untuk membantu jalannya perang. Bisa dikatakan sampai tahap ini propaganda Jepang untuk masyarakat Jepang sendiri sudah berhasil, selanjutnya Jepang menargetkan wilayah lain untuk mendukung jalannya perang dengan China.

Pada 29 Juni 1940, Jepang mengeluarkan konsep Lingkungan Bersama Asia Timur Raya (*Dai Tōa Kyōei ken*).<sup>123</sup> Konsep ini, merupakan perkembangan pan-Asianisme yang diinisiasi oleh Jepang, yang mencangkup wilayah Jepang, Manchuko, China dan seiring berjalannya waktu perang Asia Timur Raya turut mencangkup wilayah Asia Tenggara. Kondisi bangsa Asia pada masa itu sebagian besar itu masih dirantai dengan belenggu penjajahan, Jepang berusaha mengambil sisi sebagai bangsa pembebas, bangsa yang mewujudkan Lingkungan Bersama Asia Timur Raya (*Dai Tōa Kyōeiken*) dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Maka dari itu pemerintah militer Jepang merasa perlu untuk mengambil hati rakyat (*minshin ba'ku*) dan mendoktrinasi (*senbu kōsaku*) masyarakat wilayah selatan,

---

<sup>122</sup> *Ibid.* Hlm. 30.

<sup>123</sup> *Dai Tōa Kyōei ken atau Greater East Asia Co-prosperity Sphere* merupakan sebuah konsep Lingkungan Kemakmuran Asia Timur Raya, konsep ini semakin berkembang saat kejatuhan koloni Eropa di Asia Tenggara pada bula Mei dan Juni 1940. Pasca kejatuhan ini Jepang memandang Asia Tenggara sebagai kesempatan Jepang untuk melakukan ekspansinya. Lihat: Kenneth Colegrove, "The New Order In East Asia," *The Far Eastern Quarterly* Vol. 1, no. 1 (1941): 5–24, <http://www.jstor.org/stable/2049073>. p. 5.

propaganda sekali lagi dianggap sebagai langkah yang tepat dan akan mengubah jalannya perang ini.

Terbukti setelah kebijakan ini dilaksanakan intensitas propaganda Jepang semakin bertambah. Bahkan pada tanggal 16 Maret 1941, melalui radio *Taihoku* di Tokyo disiarkan sebuah siaran yang berisi harus dilakukannya langkah kerja sama antar bangsa Birma, Filipina, dan Hindia-Belanda. Jepang juga menyiratkan Jepang secara langsung sebagai pemimpinya, karena negeri-negeri selatan itu telah diperlakukan tidak adil dalam nama penjajahan.<sup>124</sup> Selain itu pemerintahan Jepang juga menaruh perhatian khusus pada wilayah Hindia-Belanda dengan melakukan propaganda melalui radio dengan memperdengarkan siaran bahasa Indonesia dan lagu kebangsaan Indonesia. Propaganda itu dilakukan dengan harapan membentuk opini masyarakat Indonesia akan dibebaskan melalui tangan Jepang. Langkah-langkah Jepang itu merupakan propaganda pembuka sebelum kedatangan Jepang ke Hindia-Belanda.

### **3.2 Departemen Sendenbu**

Pasca pendudukan militer Jepang terbentuk secara resmi, pemerintah militer Jepang di Jawa mulai mengendalikan sarana-sarana penerangan publik. Dalam hal ini pemerintahan militer Jepang menyadari pentingnya opini publik rakyat jajahan, dengan melancarkan beberapa strategi *minsbin ba'aku* (menyita hati rakyat), dan *senbu kōsaku* (mendoktrinasi dan menjinakkan mereka).<sup>125</sup> Upaya Jepang dalam pengendalian sarana penerangan sipil tidak dapat dipisahkan dari kebijakan untuk

---

<sup>124</sup> Eric, *The Japanese File: Pre-War Japanese Penetration in Southeast Asia*. *Op.cit.* p. 95.

<sup>125</sup> Kurosawa, *Kuasa Jepang Di Jawa: Perubahan Sosial Di Pedesaan 1942-1945*. Hlm. 247.

memobilisasikan seluruh masyarakat dan membuat landasan untuk mengubah mentalitas masyarakat sipil agar sesuai dengan cita-cita ideologi kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Propaganda selanjutnya diputuskan sebagai upaya untuk mendoktrinasi masyarakat Indonesia, sebagai rekan strategis dalam Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya.

Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dalam tujuan dasar pendudukan Jepang di Asia,<sup>126</sup> yang menuntut asimilasi politik kedalam semangat pan-asia dengan kontrol penuh Jepang. Propaganda semenjak awal pendudukan militer dipandang sebagai langkah utama dan salah satu hal paling penting dalam pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Oleh karena itu, dibentuk sebuah departemen independen berupa *Sendenbu*, departemen ini dibentuk oleh *Gunseikanbu* di Jawa pada Agustus 1942. Departemen ini bertanggung jawab atas propaganda informasi yang menyangkut pemerintahan sipil.<sup>127</sup> Dan secara sepenuhnya *sendenbu* terpisah dari Seksi Penerangan Tentara Angkatan Darat ke-16, yang hanya bertugas melaksanakan propaganda untuk tentara Jepang, tawanan perang, dan warga negara musuh melalui siaran luar negeri.

Kendati bertanggung jawab atas urusan informasi sipil, pemerintah militer Jepang pada praktiknya tidak pernah memberikan kepemimpinan dalam

---

<sup>126</sup> Terdapat 4 prinsip dasar dalam pendudukan Jepang ke wilayah yang diduduki, yaitu pertama pertahanan, kedua eksploitasi wilayah untuk agresi militer lebih jauh, ketiga asimilasi politik dan ekonomi kedalam semangat pan-Asia yang dikontrol Jepang, keempat menggunakan area yang dikuasai sebagai dasar untuk kemajuan asimilasi lebih lanjut. Lihat: S. Ward, *Asia for the Asiatics?: The Techniques of Japanese Occupation. Op.cit.*, p. vii.

<sup>127</sup> Lihat: Nino Oktorino, *Ensiklopedi Pendudukan Jepang Di Indonesia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, 2013) hlm.105 ; Dian Andika Winda et al., *Kamus Sejarah Indonesia Jilid I: Nation Formation (1900-1950)*, ed. Susanto Zuhdi and Nursam (Jakarta: Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, 2017)., hlm. 263.

departemen ini ke tangan sipil, dan selalu menyerahkan kepemimpinannya kepada perwira militer tentara angkatan darat yaitu, Kolonel Machida (Agustus 1942-Oktober 1943), Mayor Adachi (Oktober 1943-Maret 1945) dan Kolonel Takahashi (April-Agustus 1945).<sup>128</sup> Pemerintah militer Jepang menyadari pentingnya kontrol yang menyangkut informasi, dan propaganda pada jalannya perang. Oleh sebab itu, pemerintah militer Jepang hanya memberikan pucuk kepemimpinan departemen ini kepada perwira militer. *Sendenbu* terbagi menjadi tiga seksi, yaitu Seksi Administrasi, Seksi Pers dan Informasi, Terakhir Seksi Propaganda. Hanya Seksi Propaganda yang sepenuhnya dipimpin oleh seorang sipil, sedangkan dua seksi yang lainnya dipimpin oleh perwira militer dengan pangkat letnan atau letnan dua.

Awalnya *sendenbu* tidak hanya melaksanakan kegiatan administratif, melainkan secara langsung melaksanakan operasi-operasi propaganda. Rencana propaganda disusun dan ditangani langsung oleh kepala pemerintahan militer (*Gunseikan*) sedangkan *Sendenbu* bertugas dalam pelaksanaannya. Kepala pemimpin *Sendenbu* menjabarkan rencana operasi propaganda melalui serangkaian rapat yang dihadiri oleh kepala seksi *Sendenbu*.<sup>129</sup> Namun ketika berlangsungnya perang Asia Timur Raya struktur administrasi militer menjadi semakin rumit, sehingga membuat *Sendenbu* hanya bertindak sebagai kantor administratif. Tugas-tugas pelaksanaan diserahkan kepada beberapa biro khusus dan bertanggung jawab atas bidang-bidang propaganda berbeda serta sebagai badan independen diluar departemen *Sendenbu*.

---

<sup>128</sup> Kurosawa, *Kuasa Jepang Di Jawa: Perubahan Sosial Di Pedesaan 1942-1945. Op.cit*, hlm. 248.

<sup>129</sup> Shigetada Nishijimia, *The Nishijima Collection: Material on the Japanese Military Administration in Indonesia* (Tokyo: Waseda University, 1973)., hlm. 14.

**Tabel 3.1 Badan/Biro khusus dalam sendenbu**

Organisasi Propaganda		
Nama Organisasi	Didirikan	Fungsi
Jawa Hōsō Kanrikyoku (Biro Pengawas Siaran Jawa)	Oktober 1942	Siaran domestik (pengelolaan dipercayakan kepada NHK, siaran radio Jepang)
Jawa Shinbukai (Perusahaan Koran Jawa)	Desember 1942	Penerbitan surat kabar di Jawa (pengelolaan dipercayakan kepada Asahi Shimbun)
Dōmei (Kantor Berita)	Oktober 1942	Korespondensi
Jawa Engeki Kyōkai (Perserikatan Oesaha Sandiwara Jepang)	Tidak diketahui	Produksi seni teater
Nihon Eigasha atau Nihchi'ei (Perusahaan Film Jepang)	April 1943	Produksi Film
Eiga Haikyūsha atau Eihai (Perusahaan Pendistribusian Film)	April 1943	Distribusi Film

Sumber: Aiko Kurosawa<sup>130</sup>

Pasca pembentukan biro khusus, *Sendenbu* hanya bertindak sebagai pengontrol dan perencana propaganda, selanjutnya dibagikan kepada biro khusus terkait. Kendati demikian, pengaruh *Sendenbu* bisa dikatakan masih memiliki pengaruh kuat atas beberapa biro khusus dan organisasi independen melalui peran utamanya sebagai markas besar pengawasan dan koordinasi berbagai bidang operasi propaganda.<sup>131</sup> *Sendenbu* bisa disebut juga sebagai otak, serta sebagai departemen yang menjalankan fungsi kontrol dalam setiap operasi propaganda.

<sup>130</sup> Kurosawa, *Kuasa Jepang Di Jawa: Perubahan Sosial Di Pedesaan 1942-1945*. *Op.cit.* hlm. 248.

<sup>131</sup> Biro khusus tersebut terdiri atas, Jawa Hōsō Kanrikyoku (Biro Pengawas Siaran Jawa), Jawa Shinbukai (Perusahaan Koran Jawa), Dōmei (Kantor Berita), Jawa Engeki Kyōkai (Perserikatan Oesaha Sandiwara Jepang), Nihon Eigasha atau Nihchi'ei (Perusahaan Film Jepang), Eiga Haikyūsha atau Eihai (Perusahaan Pendistribusian Film). Lihat: *Ibid. Op.cit.*, hlm. 248-249.

Kegiatan propaganda seperti yang telah disinggung di awal merupakan langkah utama dan salah satu hal penting dalam pendudukan Jepang, karena itu pemerintah militer Jepang sangat berhati-hati dalam merekrut staf propaganda baik di unit lokal maupun pusat. Biasanya staf propaganda memiliki latar belakang yang sangat beragam, kendati demikian mereka disatukan dalam sebuah kesamaan untuk menyebarkan pan-asia, serta mengajak masyarakat untuk membantu pemerintah militer Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya.

Secara umum staf propaganda dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, staf ahli propaganda yaitu seseorang yang memang berkecimpung dalam dunia propaganda sebelumnya, kebanyakan mereka terlibat dalam perencanaan program. Kedua, staf spesialis propaganda yang terdiri dari seseorang yang ahli dalam bidang tertentu, yang umumnya disebut sebagai *Bunkajin* (Manusia Budaya) dalam masyarakat Jepang.<sup>132</sup> Penggunaan *bunkajin* ini memang sudah lazim digunakan dalam kegiatan propaganda, *Asano Akira* dan *Uio Tomizawa* merupakan salah seorang yang berpengalaman dengan operasi propaganda saat perang sino-jepang kedua.

Lazimnya staf ahli propaganda merupakan orang sipil/militer yang sebelumnya telah berpartisipasi dalam program propaganda, sehingga mereka memiliki pengalaman dalam bidang propaganda ini. Lalu golongan kedua atau staf spesialis merupakan staf yang memiliki keahlian khusus, seperti para jurnalis,

---

<sup>132</sup> Anggota staff Sendenbu yang termasuk dalam kategori *bunkajin*, seperti *Akira Asano* (Kritikus), *Sōichi Ōya* (Jurnalist), *Tomoji Abe* (Novelist), *Rintarō Kitahara* (Novelist), *Takeo Kitahara* (Novelist), *Uio Tomizawa* (Novelist), *Atsuo Oki* (Penyair), *Kenji Oe* (Novelist), *Jiromasa Gunji* (Novelist). Lihat: Widiatmoko, "Film Sebagai Media Propaganda Politik Di Jawa Pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945" (Sebelas Maret University, 2010). Hlm.88., dan Kurosawa, *Kuasa Jepang Di Jawa: Perubahan Sosial Di Pedesaan 1942-1945.*, hlm. 252.

reporter dan editor kebanyakan dari mereka merupakan staf dari *Asahi Shimbun*, selain itu penulis, penyair, novelis, pemusik, penyiar radio, produser film, dan pelukis juga turut direkrut, mereka juga termasuk golongan *Bunkajin* (manusia budaya) dalam masyarakat Jepang.

Staf *Sendenbu* dari golongan Indonesia juga dapat dibedakan menjadi dua karakteristik yang sama. Pertama golongan ahli propaganda, yang direkrut atas dasar karier sebelum perang, orientasi politik, kedudukan dalam masyarakat tradisional, kepandaian dalam berbicara dan pidato, sifat karismatik dan agitasi yang dimiliki, serta pengalaman yang dimiliki dalam gerakan anti-Belanda menjadi nilai plus yang digunakan Jepang untuk merekrut orang-orang tersebut. Salah satu bagian dari golongan ini adalah Mohammad Yamin, Chairul Saleh, Soekarni merupakan staf *Sendenbu* dari golongan ini.<sup>133</sup> Moh. Yamin memiliki pengalaman dalam gerakan kebangsaan anti-Belanda, sebaliknya Chairul Saleh dan Soekarni memiliki dasar agitator politik yang menarik perhatian pemerintah militer Jepang.

Sebaliknya kelompok kedua merupakan kelompok spesialis yang direkrut kedalam *Sendenbu* karena keahlian yang mereka miliki, seperti jurnalis, penulis, pelukis, dan musisi. Beberapa anggota staf *Sendenbu* dari golongan ini adalah, Raden Mas Soeroso (Pelukis), dan Iton Lesmana (perancang yang bertanggung jawab atas iklan), beberapa juga tergabung kedalam *Keimin Bunka Shidōshō*<sup>134</sup> seperti Sanusi Pane (Jurnalis), Armin Pane (Jurnalis), Utodjo (musisi), Raden

---

<sup>133</sup> Kurosawa, *Kuasa Jepang Di Jawa: Perubahan Sosial Di Pedesaan 1942-1945*. *Loc.cit.*

<sup>134</sup> *Keimin Bunka Shidōshō* atau pusat kebudayaan yang didirikan pada 1 April 1943, merupakan badan yang mengawasi dan mengarahkan agar karya-karya sastra seniman Indonesia seusai dengan kebijakan pemerintahan militer Jepang. Badan ini memiliki lima divisi, yang terdiri atas bagian film, musik, sandiwara, seni tari, serta seni lukis dan ukiran. Lihat: Oktorino, *Ensiklopedi Pendudukan Jepang Di Indonesia.*, hlm. 54.

Koesbini (musisi), Simanjuntak (musisi), Raden Agoes Djajasasmita (pelukis), dan Djauhar Arifin Soetomo (penulis dan drama).<sup>135</sup>

Pemerintah militer Jepang berusaha membuat jaringan propaganda di Jawa, oleh karena itu mereka membagi staf propaganda ke beberapa kota besar di Jawa (Jawa, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya) tujuannya agar kegiatan propaganda dapat berjalan sampai ke tingkat terkecil dalam masyarakat. Setelah jaringan propaganda di kota-kota besar terbentuk kemudian pemerintah Jepang membuat unit operasi distrik (*Chihō Kōsakutai*<sup>136</sup>) hal ini dilakukan agar informasi bisa terorganisir dengan baik. Setiap unit operasi distrik berada dibawah langsung *Sendenbu*, dan dipimpin oleh orang Jepang asli yang dikirim langsung dari Jakarta.<sup>137</sup> Dalam praktiknya unit operasi distrik juga sering bekerja sama dengan unit propaganda lain ditingkat keresidenan dan dibawahnya.

Dalam Jenjang pemerintah daerah, seperti kabupaten, kawedanaan, dan kecamatan terdapat juga pejabat-pejabat yang bertanggung jawab atas propaganda. Namun, pejabat-pejabat ini pada umumnya merangkap jabatan dan menyandang tanggung jawab yang lain. Birokrasi propaganda yang dilaksanakan pada tingkat dibawah keresidenan memiliki perbedaan dengan birokrasi unit operasi distrik. Dalam hal ini terdapat dualisme dalam birokrasi propaganda di bawah daerah keresidenan, jika unit operasi distrik berada dibawah langsung departemen

---

<sup>135</sup> Kurosawa, *Kuasa Jepang Di Jawa: Perubahan Sosial Di Pedesaan 1942-1945*. *Loc cit.*

<sup>136</sup> *Chihō Kōsakutai* merupakan unit operasi distrik yang dibentuk di enam kota besar, yaitu Jakarta (dengan unit operasi distriknya meliputi: Banten, Jakarta, Bogor, Kota Madya Khusus Jakarta), Bandung (dengan unit operasi distriknya meliputi: Priangan, Cirebon, dan Banyumas), Yogyakarta (dengan unit operasi distriknya meliputi: Yogyakarta/Kesultanan, Surakarta/Kesunanan, Madiun, dan Kedu), Semarang (dengan unit operasi distriknya meliputi: Semarang, Pekalongan, Pati), Surabaya (dengan unit operasi distriknya Surabaya, Bojonegoro, Madura), dan Malang (Malang, Kediri, dan Besuki). Lihat: *Ibid.*, hlm. 249-250.

<sup>137</sup> *Asia Raya*, 16 Mei 2604, hlm. 1.

*Sendenbu*, bagian propaganda di daerah kabupaten dan di bawahnya berada dibawah perintah direktur Departemen Urusan Umum (*Sōmubu*) dari Jakarta.<sup>138</sup> Kendati demikian dalam praktik operasinya mereka seringkali bekerja sama dan saling berkoordinasi satu sama lain.

Rencana propaganda disusun dengan baik oleh *sendenbu*, secara garis besar *sendenbu* membagi masyarakat Jawa menjadi dua kategori. Masyarakat terdidik dengan basis utama di urban area-perkotaan, dan masyarakat tidak terdidik dengan basis utama di rural area-pedesaan.<sup>139</sup> Keduanya memiliki teknik dan media propaganda yang berbeda, surat kabar menjadi salah satu media propaganda Jepang untuk area-area urban, dengan sasaran utama masyarakat terdidik. Surat kabar digunakan sebagai media untuk menambah informasi oleh masyarakat terdidik, Jepang dalam hal ini hanya menampilkan informasi dan menyelipkan sedikit propaganda. Pendekatan ini diambil karena masyarakat terdidik cenderung berpikir rasional terhadap informasi yang diperolehnya, oleh karena itu pendekatan propaganda secara langsung dan jelas tidak akan efektif.

Kendati demikian tema-tema dalam propaganda keduanya memiliki satu komando yang sama dari kantor pusat *sendenbu*.<sup>140</sup> Tema-tema tersebut selalu dinamis dari tahun ke tahun, dan menyesuaikan kepentingan perang saat itu. Untuk menunjang tema tersebut tersampaikan dengan baik maka pemerintah Jepang juga menerapkan standar bahasa yang digunakan. Pemerintah militer Jepang menghapus

---

<sup>138</sup> Kurosawa, *Kuasa Jepang Di Jawa: Perubahan Sosial Di Pedesaan 1942-1945. Op cit.*, hlm. 253.

<sup>139</sup> Ibid. *Op.cit.*, hlm.257.

<sup>140</sup> Nishijimia, *The Nishijima Collection: Material on the Japanese Military Administration in Indonesia. Op.cit.*, p. 11.

bahasa Belanda, dan hanya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lokal setempat.<sup>141</sup> Dalam hal ini pemerintah militer Jepang ingin menghapus bahasa Belanda dari Indonesia dan melabelinya sebagai bahasa penjajah, bahasa yang digunakan dalam surat kabar juga diutamakan menggunakan bahasa Indonesia.

### 3.3 Kebijakan Pers Masa Pendudukan Jepang

Pendudukan Jepang di Indonesia secara resmi dimulai pada tanggal 8 Maret 1942, setelah penyerahan Belanda atas tanah jajahannya di Hindia Belanda. Rencana pendudukan Jepang yang telah disusun sebelumnya mulai dijalankan, secara khusus Jepang mulai mengatur mengenai peredaran surat kabar di tanah yang sudah ditaklukkannya. Surat kabar memiliki arti penting dalam pendudukan militer Jepang di Hindia-Belanda, dalam hal ini surat kabar dipandang sebagai sarana komunikasi dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat banyak serta dapat mempengaruhi pendapat dan tindakan yang dilakukannya.<sup>142</sup> Jepang menganggap surat kabar sebagai alat bantu yang dapat mewujudkan kepentingan mereka di tanah jajahannya, ini juga merupakan hal wajar karena kerap kali media masa digunakan oleh “kelompok-kelompok berkepentingan” untuk mendapatkan banyak keuntungan.

---

<sup>141</sup> Pemerintahan militer Jepang juga berusaha menyebarkan bahasa Jepang sebagai bahasa sehari-hari, dengan menerbitkan pelajaran bahasa Jepang di setiap edisi harian dalam surat kabar Asia Raya. Walaupun demikian hasil pengajaran itu tidak bisa dilihat dalam waktu yang cepat, dan tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Lihat: Kitahara Takeo, “Peladjaran Bahasa Nippon,” *Asia Raya* (Djakarta, April 29, 2602). Hlm. 2.

<sup>142</sup> Surat kabar merupakan salah satu bagian dari media massa, karena surat kabar dapat melakukan komunikasi dan penyebaran informasi seperti lazimnya media massa. Surat kabar dan Media massa memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi, berupa isi berita, opini, komentar, hiburan, dan lain sebagainya. Lihat: Habibie, “Dwi Fungsi Media Massa.”, hlm. 79. Surat kabar atau pers memiliki fungsi utama, salah satunya adalah berkaitan dengan fungsi memengaruhi pendapat dan tindakan sebuah masyarakat. Lihat: Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 94

Perkembangan surat kabar di Hindia-Belanda menjelang kedatangan Jepang bisa dikatakan sudah matang, surat kabar lokal, maupun berbahasa asing sudah cukup banyak beredar di Hindia-Belanda. Terlepas dari regulasi surat kabar oleh pemerintah Hindia-Belanda, surat kabar berbahasa Jepang di Hindia-Belanda dapat ditelusuri dari tahun 1920-an. Pada periode itu, imigran berkekuasaan Jepang berhasil membuat sebuah surat kabar *Jawa Nippō*.<sup>143</sup> Surat kabar Jepang ini digunakan sebagai sarana informasi dan komunikasi penduduk Jepang yang merantau di negeri selatan (Hindia-Belanda). Menjelang 1930-an terjadi penguatan nasionalisme dan pan-asianisme di Jepang. Sejalan dengan itu surat kabar *Nichiran Shōgyō Shimbun*<sup>144</sup> didirikan pada tahun 1934. Kendati merupakan surat kabar beraliran ekonomi, namun staf yang mengisi surat kabar ini juga memiliki sikap kuat pada pan-asianisme.

Pasca Insiden 26 Februari 1936,<sup>145</sup> Jepang memperkenalkan kebijakan *Nanshin-ron* sebagai dasar-dasar kebijakan luar negeri Jepang, oleh karena itu

---

<sup>143</sup> *Jawa Nippō*, merupakan surat kabar berbahasa Jepang yang didirikan oleh Tsukuda Tekigai pada tahun 1920, dengan basis utamanya di Batavia. Lihat: Gotō, “Life and Death of ‘Abdul Rachman’ (1906-49): One Aspect of Japanese-Indonesia Relationships.”, p. 63.

<sup>144</sup> *Nichiran Shōgyō Shimbun* (Harian dagang Hindia-Belanda) merupakan surat kabar yang didirikan oleh Kubo Tatsuji, dia merupakan salah satu orang dengan pemahaman kuat mengenai pan-asia. Lihat: Ibid.

<sup>145</sup> 26 February Incident (*Ni Ni-Roku Jiken*), merupakan percobaan kudeta militer yang dimulai tanggal 26 Februari 1936. Peristiwa ini dipimpin oleh beberapa perwira muda Angkatan Darat Kekaisaran Jepang, tujuannya adalah menciptakan sebuah kondisi yang mengarah pada restorasi Shōwa. Tindakan mereka adalah melakukan pembunuhan para pemimpin politik, dan pebisnis korup, dengan dukungan simpati dari beberapa kalangan perwira militer senior (fraksi *Kōdō-ha*) dan sipil. Kendati mereka berhasil membunuh mantan perdana menteri *Shishaku Saito Makoto*, dan beberapa orang lain, kudeta ini pada akhirnya mengalami kegagalan. Hal ini bisa disebabkan karena tanggapan Kaisar Shōwa yang anti-pati terhadap kudeta ini, hasilnya adalah melemahnya kekuasaan anggota fraksi *Kōdō-ha* di Tentara Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Sebabnya adalah pucuk utama fraksi ini seperti, Jenderal *Mazaki Jinzaburō*, Jenderal *Araki Sadao*, bersama beberapa jenderal faksi *Kōdō-ha* dan perwira menengah dinonaktifkan atau dikirim ke posisi yang jauh dari perpolitikan utama di Ibukota. Lihat: Brian Victorian, “Japanese Shōwa Restoration Movement: Pawns and Dire Threats,” *The Asia-Pacific Journal* Vol. 20, no. 6 (2022), p. 6-7.

rakyat Jepang di seberang lautan mulai menyebarkan semangat pan-asianisme sebagai landasan dari kebijakan luar negeri itu. Selanjutnya pada tahun 1937 surat kabar *Nichiran Shōgyō Shimbun* bergabung dengan *Jawa Nippō*, dan mendirikan surat kabar gabungan *Toindō Nippō*<sup>146</sup> (*East Indies Daily*). Melalui surat kabar ini juga tokoh-tokoh propagandis Jepang seperti *Tatsuo Ichiki*, *Yoshizumi Tomegorō*, dan *Kaneko Keizō*, mulai berkontak dengan pihak nasionalis di Indonesia sekaligus menyebarkan pan-asianisme yang dibawa Jepang.

Perhatian lain Jepang terhadap perkembangan surat kabar di Hindia-Belanda juga terlihat dengan dibelinya sebuah percetakan dan penerbitan *Tjahaja Pasoendan*, kemudian mereka menerbitkan surat kabar lain dengan nama *Warta Harian*.<sup>147</sup> Jepang memandang surat kabar merupakan sarana yang cukup efektif dalam menyebarkan informasi, ide-ide, dan gagasan pan-asianisme dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Ditambah dengan Insiden Nomonhan pada 1939, menjadikan Jepang secara sepenuhnya menganut kebijakan luar negeri ekspansi ke Selatan (*Nanshin-ron*). Surat kabar juga diharapkan dapat menarik hati dan mendoktrinasi masyarakat, sehingga dalam proses ekspansi penuh nanti masyarakat bisa menerima sepenuhnya langkah dan tindakan yang dilakukan Jepang. Langkah

---

<sup>146</sup> Versi lain menyebutkan gabungan surat kabar *Nichiran Shōgyō Shimbun* dan *Jawa Nippō* juga terbit di Jepang dengan nama *Higashi Indo Nippō*. *Higashi Indo Nippō* atau *Toindo Nippō* harus menghentikan penerbitannya setelah staf Jepang di kantor berita *Dōmei*, sumber berita utamanya dipulangkan ke Jepang ke Jepang pada bulan November 1941. Namun staf dan jurnalisnya kembali ke Jawa pada bulan Maret 1942 sebagai bagian dari Departemen Propaganda Tentara Angkatan Darat ke-16 Kekaisaran Jepang. Lihat: Kaoru Ueda, "Jawa Nippō Naichiban," *Hoji Shinbun Digital Collection*, last modified 2017, accessed September 14, 2023, <https://hojishinbun.hoover.org/Jawa-Nippō-naichiban>.

<sup>147</sup> Pembelian penerbitan *Tjahaja Pasoendan* diinisiasi oleh Yōsuke Matsuoka (Presiden direktur Jawatan Kereta Api Manchuria Selatan periode 1935-1939) sebagai pendana, Ainosuke Iwata (Agitator Pan-Asianisme), dan Biro Penelitian Ekonomi di Hindia Timur. Lihat: Soebagijo Ilham Notodidjojo, *Sumanang: Sebuah Biografi* (Jakarta: Gunung Agung, 1980). Hlm. 70.

yang diambil oleh Jepang untuk melakukan propaganda ini merupakan langkah sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemerintah Hindia-Belanda.

Kendati demikian, menjelang Perang Asia Timur Raya terjadi ketegangan antara pemerintah Hindia-Belanda dan Pemerintah Jepang. Diawali dengan pencabutan bebas visa bagi warga negara Jepang di Hindia Belanda pada tanggal 15 Februari 1941, hingga dalam waktu yang singkat terjadi pemutusan hubungan dan pembekuan aset-aset milik Jepang di Hindia-Belanda pada 28 Juli 1941.<sup>148</sup> Staf dari koresponden dan Jurnalis *Dōmei* (sebagian merangkap juga sebagai *staf dari Toindo Nippō*) di Hindia-Belanda harus dipulangkan ke Jepang pada bulan November 1941. Kendati demikian mereka pada akhirnya akan kembali ke Jawa, bukan sebagai jurnalis melainkan sebagai bagian dari Departemen Propaganda Tentara Angkatan Darat ke-16 Kekaisaran Jepang.

Hingga ketika Perang Asia Timur Raya berlangsung, surat kabar dipandang dan digunakan sebagai alat propaganda untuk mendapatkan legitimasi dan keuntungan praktis dalam memenangkan perang Asia Timur Raya. Jepang menyadari keuntungan praktis dalam memonopoli informasi, dengan alasan itu Jepang mulai merencanakan regulasi dari peredaran surat kabar, regulasi ini tertuang dalam dokumen no.18 dalam *Japanese Military Administration*. Regulasi ini termasuk kedalam bagian dari Departemen Propaganda, yang terdiri atas beberapa hal mendasar dalam kebijakan pers dan penerangan di Jawa.

---

<sup>148</sup> Shiraishi and Shiraishi, *Orang-Orang Jepang Di Kota Koloni Asia Tenggara.*, hlm. 223.

Pertama, pers masa pendudukan militer Jepang diharapkan dapat membuat surat kabar yang sepenuhnya dibawah kendali pemerintah militer.<sup>149</sup> Menurut regulasi ini manajemen surat kabar Jepang di Jawa dan Borneo diserahkan kepada salah satu divisi dari *Asahi Shimbunsha* (Perusahaan Surat Kabar Asahi), rencananya adalah membuat satu surat kabar utama dalam daerah pendudukan militer angkatan darat ke-16 tentara kekaisaran Jepang. Rencana ini terlaksana dengan membuat serikat surat kabar *Jawa Shimbunkai* sebagai organisasi utama yang mengontrol peredaran, dan percetakan surat kabar di Jawa. Selain itu, surat kabar *Unabara*<sup>150</sup> yang sudah terbit tetap dilanjutkan sebagai organ pendidikan dan propaganda yang ditunjukkan kepada orang Jepang dibawah pengawasan langsung pemerintah militer.

Bagian manajerial dalam surat kabar di Jawa diserahkan sepenuhnya kepada staf *Asahi Shimbunsha*, dalam hal ini mereka memiliki hak penuh dalam mengelola surat kabar di Jawa. Sistem surat kabar yang dibangun Jepang di Jawa merupakan pelaksanaan dari sistem authoritarian<sup>151</sup> dalam media massa, dengan mengontrol

---

<sup>149</sup> Prinsip Dasarnya adalah membuat satu surat kabar utama di Jawa, hak manajemen diberikan kepada perusahaan Asahi Shimbunsha. Walaupun begitu Unabara sebagai surat kabar yang dibentuk sebelumnya tetap dipercaya sebagai bagian dari program edukasi dan propaganda militer bagi seluruh rakyat Jepang. Lihat: Benda, K. Irikura, and Kishi, *Japanese Military Administration.*, p. 69.

<sup>150</sup> Pasca kedatangan dan penyerahan kekalahan Belanda pada 8 Maret 1942, sebenarnya telah hadir surat kabar *Sekidōhō* (Laporan dari Equator). Surat Kabar *Sekidōhō* merupakan surat kabar berbahasa Jepang dengan kontrol sepenuhnya oleh Pemerintah Militer Tentara Angkatan Darat ke-16. Namun tidak berlangsung lama *Sekidōhō* kemudian berganti nama menjadi *Unabara* pada bulan April 1942. Pemerintah militer Jepang menggunakan staf jurnalisisme yang dulu dipulangkan dari Jawa dan peralatan surat kabar *Higashi Indo Nippō* di Batavia. Dalam perjalanannya surat kabar *Unabara* hanya bertahan sampai bulan Desember, tidak lama dari itu kemudian *Jawa Shimbun* dibawah *Asahi Shimbun* terbit dan menggantikannya sebagai surat kabar berbahasa Jepang. Lihat: Ibid.

<sup>151</sup> Teori Authoritarian Concept atau teori pers otoriter, dalam pandangannya pers dimiliki oleh penguasa, sejak zaman renaisans. Pers berfungsi dari atas ke bawah. Sebagai kepanjangan kekuasaan dari penguasa, rakyat hanya mengetahui informasi yang diberikan oleh penguasa, serta

sepenuhnya jalannya surat kabar di tanah pendudukan Jepang di Jawa. Keunggulan dari sistem ini adalah arus informasi dapat diatur sepenuhnya oleh pihak pemerintah, sehingga diharapkan stabilitas pemerintahan bisa tercapai. Sekalipun begitu, kebebasan pers atas informasi dan menyatakan pendapat sangat dibatasi, sehingga tidak adanya arti komunikasi masyarakat dengan pemerintah (fungsi kontrol) melalui pers.

Kedua, berusaha membuat surat kabar lokal berbahasa Indonesia dengan satu semangat yang sama di seluruh pulau Jawa, dimulai dengan membuat surat kabar *Asia Raya*. Hubungan terpadu antara surat kabar *Unabara* dan *Asia Raya* merupakan kunci utama dalam membuat regulasi surat kabar, serta sangat penting untuk menjaga dan memelihara hubungan keduanya.<sup>152</sup> Dengan kata lain antara surat kabar Jepang dan surat kabar lokal perlu menyamakan persepsinya untuk dapat secara efisien menarik dukungan masyarakat dan mendukung langkah Jepang, dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya.

Ketiga motif keuntungan dalam surat kabar juga perlu dihilangkan sepenuhnya, karena pada prinsip dasar pers pemerintah militer Jepang menganggap opini masyarakat bisa memengaruhi jalannya perang. Peringatan keras harus dikeluarkan, jika terdapat pemindahan kepemilikan surat kabar kepada masyarakat untuk keuntungan pribadi maupun untuk penyederhanaan administrasi. Surat kabar sepenuhnya dipakai untuk kepentingan memenangkan perang Asia Timur Raya dan mengesampingkan keuntungan komersial dari surat kabar. Biaya dan pungutan dari

---

politik apa yang perlu diketahui oleh rakyat. Lihat: Iman Taufik, *Sejarah & Perkembangan Pers Di Indonesia* (Jakarta: PT. Triyinco, Trinity Press, 1977)., hlm. 9.

<sup>152</sup> Benda, K. Irikura, and Kishi, *Japanese Military Administration*. *Loc.cit.*

masyarakat diharapkan hanya digunakan untuk menjalankan operasional surat kabar saja.

Tidak lama setelah itu, Kepala Panglima Tentara ke-16 (*Gunshireikan*) mengeluarkan regulasi mengenai pengawasan dan penilikan atas pengumuman dan penerangan. Peraturan itu tertuang dalam perundang-undangan daerah Pendudukan Militer Jepang Tentara Angkatan Darat ke-16 *Osamu Seirei* No. 16 Tahun 2602,<sup>153</sup> dan revisinya pada perundang-undangan daerah Pendudukan Militer Jepang Tentara Angkatan Darat ke-16 *Osamu Seirei* No. 06 Tahun 2604.<sup>154</sup> Sebagian besar perubahan pada *Osamu Seirei* No. 6 Tahun 2604 mengulas mengenai dua hal pokok yang berkaitan dengan perubahan penyensoran preventif (*preventive censuur*) dan mengatur tentang tata cara pengajuan izin. Pada intinya kedua peraturan itu tetap memiliki kesamaan mengenai hal pokok yang diaturnya berupa, pertama mengenai perizinan dan pelarangan, kedua mengenai penyensoran, dan terakhir mengenai hukuman pelanggarannya.

### **3.3.1 Bagian Pertama: Perizinan dan Pelarangan Terbit**

Berkaitan dengan regulasi perizinan diatur dalam pasal pertama dan pasal ketujuh *Osamu Seirei* No. 16 tahun 2602. Secara jelas pasal pertama<sup>155</sup> menjelaskan bahwa setiap penerbitan, percetakan maupun badan-badan yang menyebarkan informasi di daerah yang ditaklukkan pemerintah militer Jepang harus memiliki izin

---

<sup>153</sup> Saikoo Sikikan, "Soal Pengawasan Dan Penilikan Atas Pengoemoeman Dan Penerangan: Pendjelasan Oendang-Oendang No. 16," *Asia Raya* (Djakarta, May 29, 2602)., hlm. 2.

<sup>154</sup> Saikoo Sikikan, "Osamu Seirei No. 6 Tahun 2604, Tentang Mengawasi Penerbitan Dsb.," *Asia Raya* (Djakarta, February 3, 2604)., hlm. 2.

<sup>155</sup> Bunyi Pasal (1), "*Segala matjam badan pengemoeman didaerah jang didoedoeki oleh Balatentera Dai Nippon mesti mendapat izin.*" Lihat: Saikoo Sikikan, "Soal Pengawasan Dan Penilikan Atas Pengoemoeman Dan Penerangan: Pendjelasan Oendang-Oendang No. 16." *Loc.cit.*

yang jelas.<sup>156</sup> Perizinan itu sejatinya membatasi surat kabar sebagai sarana penyebaran informasi dan komunikasi. Sehingga dengan adanya izin ini surat kabar yang layak cetak merupakan surat kabar yang sejalan dengan tujuan pemerintah militer Jepang. Selanjutnya pada pasal tujuh<sup>157</sup> secara spesifik memberikan ketentuan mengenai identitas surat kabar. Tujuannya adalah agar dapat jelas terlihat oleh masyarakat dan pemerintah militer Jepang, yang akan dengan mudah dapat teridentifikasi surat kabar yang beredar itu memiliki izin atau tidak.

Pemerintah militer Jepang juga melarang surat kabar, badan penerangan yang tidak sesuai dengan tujuan pendudukan militer di Jawa untuk terbit, sebagai mana diatur dalam pasal dua, dan pasal lima.<sup>158</sup> Larangan terbit itu dilakukan sebagai langkah antisipasi dari menyebarnya informasi melalui surat kabar tidak berizin. Pemerintah militer Jepang seperti yang disebutkan diawal, menganggap media massa sebagai sarana yang bisa memengaruhi jalannya perang. Mereka tidak mau mengambil risiko untuk membiarkan percetakan dan penerbitan yang tidak sejalan dengan pemerintah militer Jepang untuk tetap terbit, dan mengganggu jalannya Perang Asia Timur Raya. Batasan media massa cetak juga disebutkan dengan jelas

---

<sup>156</sup> Izin terbit itu biasanya didapatkan dari Maklumat Pemerintah Militer Jepang, seperti yang terjadi dalam kasus surat kabar Tjahaja di Bandung yang diberikan izin terbit melalui Maklumat No. 16. Maklumat itu juga menjelaskan surat kabar Tjahaja merupakan hasil mufakat dari direktur surat kabar Nicork Express, Sipatahoenan, Sinar Pasoendan (termasuk Priangan) dan Kaoem Moeda, sekaligus menghentikan operasional surat kabar-surat kabar itu. Lihat: Pemerintah Balatentara Dai Nippon, “Tjahaja” Terbit Di Bandoeng,” *Asia Raya* (Jakarta, June 3, 2602), hlm. 3.

<sup>157</sup> Bunyi pasal (7), “*Nama dan tempat pentjetak dan penerbit jang menangoeng jawab, haroes ditjetak dengan terang, pada baran tjetakan seperti soerat kabar, boekoe, soerat tempelan, soerat siaran, soerat keterangan dan sebagainya.*” Lihat: Saikoo Sikikan, “Soal Pengawasan Dan Penilikan Atas Pengoemoeman Dan Penerangan: Pendjelasan Oendang-Oendang No. 16.” *Loc.cit.*

<sup>158</sup> Bunyi Pasal (2), “*Tiap-tiap badan pengemoeman dahoeloe jang bersifat bermoesoehan, dilarang meneroeskan pekerdjajna.*” Dan bunyi Pasal (5), “*Segala sesoeatoe penerangan jang dianggap bertentangan dengan Balatentara Dai Nippon dan Pemerintah Balatentara Dai Nippon baik opisil atau sengah opisil, maoepoen apapoepoen djoega isi kabar itoe, dilarang disiarkan.*” Lihat: *Ibid.*

pada pasal tiga.<sup>159</sup> Sebagaimana disebutkan dalam pasal itu, pemerintah militer Jepang melarang menerbitkan semua barang cetakan yang memberikan informasi atau pengumuman baik yang sifatnya percetakan rutin harian, mingguan, bulan, maupun segala jenis percetakan yang tidak tentu waktunya.

Regulasi perizinan dan larangan baru mengalami perubahan setelah dikeluarkannya *Osamu Seirei* No. 6 Tahun 2604,<sup>160</sup> Pada pasal 1 ayat (1) secara langsung membahas mengenai pelarangan terbit pada media massa yang dapat menghalangi tujuan Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya, utamanya yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan ketenteraman. Selanjutnya pasal 1 ayat (2) secara langsung melarang penerbitan yang menampilkan ketidak senonohan, dan melanggar norma kesopanan.<sup>161</sup> Ayat itu mengindikasikan pemerintah Jepang berusaha menjaga norma-norma ketimuran, yang menjunjung tinggi norma kesopanan dan kesusilaan. Selain itu, pasal selanjutnya juga menjelaskan mengenai definisi yang termasuk kedalam surat kabar dalam undang-undang ini.<sup>162</sup> Surat kabar dalam regulasi ini merupakan hasil penerbitan yang memakai nama tetap dengan waktu penerbitan harian, mingguan,

---

<sup>159</sup> Bunyi Pasal (3), “*Terlarang menerbitkan barang tjetakan jang berhoeboengan dengan pengemoeman ataoe penerangan, baik jang beroepa penerbitan setiap hari, setiap minggoe, setiap boelan, maoepoen penerbitan jang tidak tentoe waktoenja, ketjoekali oleh badan-badan jang soedah mendapat izin.*” Lihat: Ibid.

<sup>160</sup> Bunyi pada pasal 1 ayat (1), “*Soerat-soerat, gambar-gambar, loekisan-loekisan jang dapat merintanghi oesaha peperangan Balatentara Dai Nippon, atau jang dapat mengganggu ketentraman, keamanan, dan ketertiban oemoem, dan djoega jang dapat merintanghi oesaha pemerintahan Balatentara, tidak boleh dioemoemkan.*” Lihat: Gunseikanbu, *Bokoe Pengoempoelan Oendang-Oendang: Diksoesoen Dengan Peroebahan Dan Tambahan Sampai Penghabisan Boelan 6, Tahoen Syoowa 19 (2604)*. hlm. 144.

<sup>161</sup> Bunyi pada Pasal 1 ayat (2), “*Soerat-soerat, gambar-gambar, loekisan-loekisan jang dapat meroesakan peri kesopanan, tidak boleh dioemoemkan.*” Lihat: Ibid.

<sup>162</sup> Bunyi pada Pasal 2, “*... Sedang jang dimaksoed dengan soerat kabar ialah pengeloearan jang memakai nama tetap dan jang terbit pada waktoe jan tertentoe, atau pada waktu jang tidak tentoe atau pada waktoe jang tidak tentoe dalam 6 boelan dan joega pengeloearan istimewa...*” Lihat: Ibid.

bulanan, dan waktu yang tidak menentu dalam kurun waktu 6 bulan, termasuk edisi istimewa dengan nama yang tetap.

Mengenai Perizinan, penerbitan surat kabar dijelaskan juga dalam *Osamu Seirei* ini pada pasal 4.<sup>163</sup> Bisa dikatakan pemerintah militer Jepang mulai memberikan kelonggaran bagi masyarakat yang ingin mendirikan surat kabar agar bisa mengajukan surat permohonannya yang ditunjukkan kepada staf *Gunseikan*. Hal ini tentu merupakan langkah besar, karena sebelum adanya *Osamu Seirei* ini perizinan hanya bisa diajukan dengan musyawarah antara pemohon dan staf Departemen Propaganda. Memang menjelang akhir perang Jepang menyadari pengekanan berlebihan dalam sebuah masyarakat bisa menghasilkan konflik vertikal antara penguasa dan masyarakatnya.

Selain itu pemerintah Jepang juga mengatur mengenai identitas surat kabar yang boleh terbit, dengan diatur dalam pasal 6.<sup>164</sup> Menurut pasal ini, setiap surat kabar harus menampilkan identitas surat kabar pada halaman pertama, meliputi nama surat kabar, nomor izin, tanggal izin, tanggal terbit, alamat penerbit, nama penyusun dan pencetak yang telah diberikan izin menurut pasal 4. Dengan adanya identitas ini, diharapkan peredaran surat kabar tidak berizin bisa ditekan seminimal mungkin.

---

<sup>163</sup> Bunyi pada Pasal 4, Dengan bunyi, “*Barang Siapa hendak menerbitkan soerat kabar, haroes menjampaiakan soerat permohonan meneoeroet tjontoh No. 2 kepada Gunseikan untuk mendapat izinnja.*” Lihat: Ibid.

<sup>164</sup> Bunyi Pasal 6, “... *Pada soerat kabar, jaitoe pada halaman petama, haroes diseboetkan, nomor izin, tanggal izin, tanggal terbit, serta nama dan alamat penerbit, penjoesoen dan pentjetak, jang telah mendapat izin menoeroet pasal 4 ...*” Lihat: Ibid.

### 3.3.2 Bagian Kedua: Sensor dan Pemeriksaan Informasi

Sensor secara definisi merupakan pengawasan dan pemeriksaan dalam media massa agar tidak bertentangan dengan norma, peraturan dan hukum yang berlaku.<sup>165</sup> Dalam pandangan masyarakat modern kata sensor mungkin berkonotasi negatif, pandangan itu mungkin tepat jika berada dalam keadaan damai karena akan menghilangkan kebebasan berpendapat. Namun dalam keadaan perang, sensor sangat diperlukan demi menjaga moral pasukan dan masyarakat yang terlibat dalam perang. Walaupun begitu terdapat titik temu sensor dalam keadaan damai dan perang, yaitu keduanya sama-sama menjaga kestabilan dalam kehidupan sosial-masyarakat. Sensor pada masa perang dunia kedua hampir digunakan oleh sebagian besar negara yang terlibat, baik itu dipihak sekutu, maupun pihak axis. Termasuk dalam masa pemerintah militer Jepang, sensor digunakan untuk mengawasi dan membatasi informasi yang keluar masuk daerah pendudukan militer.

Pemerintah militer Jepang sedari awal masa pendudukan sudah menyiapkan instrumen dalam melakukan penyensoran terhadap informasi yang disebarkan berbagai media massa. *Gunshireikan* membentuk unit khusus penyensoran yang disebut dengan *Kenetsuhan*.<sup>166</sup> *Kenetsuhan* ini memiliki wewenang untuk menentukan informasi sejalan atau tidak dengan tujuan Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya. Namun sebenarnya dalam *Sendenbu* juga

---

<sup>165</sup> David Moeljadi et al., "Kamus Besar Bahasa Indonesia Mobile (KBBI)," 2016. Diakses pada 30 September 2023.

<sup>166</sup> Mengenai *Kenetsuhan* atau *Gunkenetsu*, sangat sedikit informasi mengenai unit sensor ini bahkan birokrasi dari badan ini masih dipertanyakan. Menurut satu sumber *Kenetsuhan* berada langsung dibawah *Gunshireikan* (Panglima Tentara Ke-16), namun semenjak janji koiso urusan sensor diserahkan ke *Sendenbu*. Lihat: Widiatmoko, "Film Sebagai Media Propaganda Politik Di Jawa Pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945.", hlm. 99.

terdapat unit sensor terpisah di setiap biro khusus *Sendenbu*. Bagian sensor berusaha membuat aliran informasi di wilayah pendudukan ideal, sejalan dengan yang diharapkan oleh pemerintah militer Jepang. Kondisi Ideal ini akan memudahkan dalam melakukan propaganda, untuk menarik hati rakyat (*minsbin ba'aku*) dan medoktrinasi (*senbu kōsaku*) demi kemajuan Perang Asia Timur Raya.

Regulasi mengenai sensor pada surat kabar diatur dalam *Osamu Seirei* No. 16 tahun 2602, pada pasal empat.<sup>167</sup> Pasal itu secara khusus meminta tiap-tiap media massa harus diperiksa oleh pihak pemerintah militer sebelum menyebarkannya, dalam hal isi artikel, opini, tajuk rencana, bagian sastra bisa selaras dengan kepentingan pemerintah militer Jepang. Diperjelas lagi pada pasal sembilan,<sup>168</sup> Berkenaan dengan perlunya surat izin cetak pada keadaan tertentu, seperti pada perusahaan penerbitan swasta, yang menjelaskan jenis tulisan, isi tulisan dan juga nama orang yang memerintahkan untuk mencetak. Adanya surat izin itu secara langsung menyulitkan penerbit swasta untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat.

Tempat kedudukan lembaga penyensoran juga disebutkan dalam pasal sepuluh,<sup>169</sup> yang menyatakan, kantor *Kenetsuhan* (unit sensor) berada di kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Batavia, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan

---

<sup>167</sup> Bunyi Pasal 4, "Badan-badan pengemoemoen dan penerangan jang soedah mendapat izin haroes minta penilikan dahaeloe kepada bahagian Balatantara Dai Nippon jang bersangkoetan sebeloem menjiarkan barang tjetakannja." Lihat: Saikoo Sikikan, "Soal Pengawasan Dan Penilikan Atas Pengemoeman Dan Penerangan: Pendjelasan Oendang-Oendang No. 16." *Loc.cit.*

<sup>168</sup> Bunyi Pasal 9, "Peroesahaan<sup>2</sup> pertjetakan jang mentjetak boeat orang partikelir, sebeloem mentjetak haroes mempoenjai soerat izin soerat izin dari kantor penilikan bala tantara, jang menjeboetkan nama orang jang menjoeroeh tjetak, lagi poela matjam dan isi apa jang akan ditjetak." Lihat: *Ibid.*

<sup>169</sup> Bunyi Pasal 10, "Kantor<sup>2</sup> penilikan terletak di Batavia, Bandoeng, Semarang, Jogja (atau Solo), dan Soerabaja, sedang kantor penilikan tertinggi tempatnja di Batavia." Lihat: *Ibid.*

Surabaya. Pemerintah militer Jepang berusaha mendekatkan unit sensor dengan masyarakat, diharapkan dengan desentralisasi unit sensor ini bisa memudahkan pelaksanaan kegiatan penyensoran di Pulau Jawa. Meskipun langkah ini juga menyiratkan pentingnya penyensoran sebelum informasi itu tersebar ke masyarakat.

Urusan sensor juga mengatur mengenai operasi militer yang dilakukan pemerintah militer Jepang, informasi operasi militer berupa pertempuran, pengepungan, atau pertahanan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak mana pun. Seperti yang disebutkan dalam pasal enam,<sup>170</sup> khususnya informasi yang diizinkan beredar dalam masyarakat adalah informasi yang bersumber langsung dari pemerintah militer, melalui berbagai media massa. Informasi dalam perspektif militer merupakan bagian vital dan penting, posisi informasi bisa digunakan untuk mengevaluasi, dan menyusun langkah balasan yang akan diambil. Agaknya pemerintah militer Jepang berusaha menjaga informasi operasi militer agar tidak digunakan untuk kepentingan musuh dalam melawan Jepang.

Selain itu pembatasan informasi juga membatasi keluar masuk surat kabar dari dan keluar wilayah pendudukan Jepang. Sebagaimana dalam pasal delapan,<sup>171</sup> informasi dari dan kedalam wilayah pendudukan dibatasi, barang penerbitan berupa surat kabar, majalah, pamflet, dan sejenisnya dibatasi untuk satu wilayah saja,

---

<sup>170</sup> Bunyi Pasal 6, "*Oentoek kepetingan Balatentara, maka tiap-tiap penerangan tentang gerakan, pertahanan, atau akibat perang dari Balatentara, tidak boleh dioemoemkan oleh siapapoen djoega, ketjoeali dengan perantaraan badan Balatentara.*" Lihat: Ibid.

<sup>171</sup> Bunyi Pasal 8, "*Oentoek sementara waktoe orang-orang didaerah yang didoedoeki bala tantara Dai Nippon dilarang mengeloearkan ataoe memasoekan penerbitan ke ataoe dari daerah loear. Penerbitan jang ditjetak di Indonesia boleh dikirimkan antara Jawa dan Madoera dan tempat-tempat lain di Indonesia, apabila mendapat izin bala tantara Dai Nippon.*" Lihat: Ibid.

selain itu dilarang masuk maupun keluar. Kendati demikian terdapat pengecualian apabila diizinkan oleh pemerintah militer Jepang, penerbitan yang terbit di Indonesia boleh dikirimkan masuk dan keluar antara Jawa dan Madura.

Dalam perkembangan pemerintahan militer di Indonesia regulasi mengenai penyensoran mengalami perubahan, tepatnya setelah keluar Osamu Seirei No. 6 Tahun 2604 tentang mengawasi penerbitan dsb.<sup>172</sup> Pasal ketiga, yang secara jelas mengatur mengenai kewajiban bagi penerbit untuk menyerahkan salinan isi pemberitaannya kepada *Gun-ken-etsu* atau *Kenetsuhan*. Peraturan ini juga dengan jelas menyebutkan sebuah unit sensor pemerintah militer yang disebut *Gun-ken-etsu* yang memiliki wewenang untuk memeriksa isi yang akan diterbitkannya. Pentingnya menyerahkan isi penerbitan pada *Gun-ken-etsu* ditekankan pada pasal lima,<sup>173</sup> berisi segala hal yang belum diperiksa oleh unit *Gun-ken-etsu* tidak boleh diterbitkan dalam surat kabar.

Terdapat ketentuan sampling atau contoh surat kabar yang akan dipublikasikan harus diserahkan pada pihak *Gunseikanbu*, dan *Gun-ken-etsu* seperti yang dituliskan dalam pasal ketujuh.<sup>174</sup> Selain itu, terdapat pula larangan untuk mengekspor surat kabar ke daerah luar Jawa, sebagaimana yang dituliskan pada

---

<sup>172</sup> Bunyi Pasal 3, “Barang siapa yang hendak mengeloearkan penerbitan harus lebih dahoeloe menjerahkan isi penerbitan itoe kepada kantor peosat Gun-Ken-etu (sensor Balatentara) atau tjabangnja oentoek diperiksanja dan menajampaikan soerat permohohonan tjontoh No. 1 kepada Gunseikan, untuk mendapatkan izinnja.” Lihat: Gunseikanbu, *Bokoe Pengoempoelan Oendang-Oendang: Diksoesoen Dengan Peroebahan Dan Tambahan Sampai Penghabisan Boelan 6, Tahoen Syoowa 19 (2604)*. Loc.cit.

<sup>173</sup> Bunyi Pasal 5, “Segala apa jang beloem diperiksa oleh kantor poesat Gun-ken-etsu atau tjabangnja tidak boleh dimoeat dalam soerat kabar.” Lihat: Ibid.

<sup>174</sup> Bunyi Pasal 7, “Sebeloem mendjoeal atau menjiarkan penerbitan atau soerat kabar, penerbitnja haroes memberikannja doea boeah masing-masing kepada Gunseikanbu dan Gun-ken-etsu, ...” Lihat: Ibid.

pasal kesepuluh.<sup>175</sup> Larangan mengenai impor surat kabar dari daerah diluar Jawa juga diatur dalam pasal sebelumnya, menghasilkan keputusan impor surat kabar diperbolehkan asalkan isi surat kabar tersebut sudah lolos penyensoran oleh kantor pusat *Gun-ken-etsu*. Melalui peraturan ini, informasi yang berasal dari surat kabar dari luar Jawa dibatasi dengan catatan lulus sensor dari pihak *Gun-ken-etsu*.

### 3.3.3 Bagian Ketiga: Regulasi Hukuman Pelanggaran

Regulasi hukuman dibuat dengan tujuan memberikan efek jera pada pelanggar hukum. Masa pemerintahan militer Jepang juga mengatur regulasi hukum pidana pada pelanggaran undang-undang pemerintahan militer (*Osamu Seirei*) yang mengatur mengenai penerangan dan pengumuman. Seperti yang dicantumkan dalam *Osamu Seirei* No.16 Tahun 2602 (1942) pada pasal sebelas,<sup>176</sup> menurut undang-undang itu, hukuman yang diberikan kepada pelanggar regulasi media massa pada masa pendudukan militer Jepang di Jawa berupa hukum pidana penjara dan pidana denda.

Dengan ketentuan khusus yang melanggar pasal 4, 7, 8, 9 atau berkaitan dengan pidana ringan dengan hukuman paling lama satu tahun atau denda paling banyak seribu rupiah dalam kurs masa itu. Pelanggar pasal itu juga dapat diidentifikasi kedalam ranah sipil karena menurut pasal itu juga pelanggar pasal 4,

---

<sup>175</sup> Bunyi Pasal 10, “Penerbitan soerat kabar atau pilem jang beloem diperiksa isinja oleh kantor pusat *Gun-ken-etsu* tidak boleh di eksport ke daerah diluar Djawa. Penerbitan atau soerat kabar jang di-import dari daerah diloeat Djawa tidak boleh didjoeal atau disiarkan sebeloem diperiksa isinja oleh kantor poesat *Gun-ken-etsu*.” Lihat: Ibid.

<sup>176</sup> Bunyi Pasal 11, “Orang jang melanggar pasal 4, 7, 8, dan 9 akan dihoekoem penjara paling lama setahoen, ataoe dedenda sebanjak-banjaknja seriboe roepiah. Perkara itoe diadili oleh *Goensei Hooiin* (pengadilan pemerintah bala tantara). Orang jang melanggar pasal 2, 3, 5, dan 6 diadili oleh *Goenritsoe Kaigi* (*Krijgsraad*.” Lihat: Saikoo Sikikan, “Soal Pengawasan Dan Penilikan Atas Pengoemoeman Dan Penerangan: Pendjelasan Oendang-Oendang No. 16.” *Loc.cit*.

7, 8, 9 diadili oleh pengadilan sipil *Gunsei Hooiin*<sup>177</sup> (Pengadilan Pemerintah Pendudukan Militer). Sedangkan pelanggar yang melanggar pasal 2, 3, 5 dan 6 atau dalam hal ini tidak disebutkan dengan jelas besar hukuman yang diberikannya. Walaupun begitu, pelanggar pasal tersebut bisa dikatakan merupakan pelanggaran berat, karena secara langsung diadili oleh *Gunritsu Kaigi*<sup>178</sup> (Pengadilan Militer Pendudukan Militer) yang biasanya mengelola pelanggaran berat berkaitan dengan ancaman langsung keberlangsungan Perang Asia Timur Raya. Selanjutnya pasal dua belas, “*Oendang-oendang ini moelai berlakoe semenjak dioemoemkan.*” Sekaligus menegaskan peraturan regulasi mengenai penerangan dan pengumuman ini mulai berlaku efektif pasca pengumuman ini diumumkan.

Regulasi mengenai hukuman penerbitan, penerangan dan pengumuman mengalami revisi dari pemerintah militer Jepang sejalan dengan diterbitkannya *Osamu Seirei* No. 6 tahun 2604.<sup>179</sup> Perubahan dalam hal regulasi hukuman mengenai penerangan dan penerbitan yang diatur dalam *Osamu Seirei* No. 6 Tahun 2604, lebih menguraikan kembali hukuman yang sebelumnya diatur dalam *Osamu Seirei* No. 16 Tahun 2602. Peraturan ini dibuat mempertimbangkan kondisi Perang Asia Timur Raya yang semakin dahsyat, eskalasi konflik yang semakin bertambah

---

<sup>177</sup> *Gunsei Hooiin* merupakan pengadilan pemerintah pendudukan militer, dengan dikhususkan mengadili baik dalam hal kejahatan dan pelanggaran, maupun perkara sipil. Pembentukannya didasarkan pada *Osamu Seirei* No. 14 Tentang Peraturan Pengadilan Pemerintahan Militer. Lihat: Pembesar Balatentara Dai Nippon, “Oendang-Oendang No. 14 Tentang Peratoeran Pengadilan Balatentara Dai Nippon,” *Asia Raya* (Djakarta, May 2, 2602). hlm. 2.

<sup>178</sup> *Gunritsu Kaigi* merupakan badan peradilan militer yang dibentuk melalui *Osamu Gun Rei* No. 1, dengan mengkhususkan segala macam perkara yang berhubungan dengan pemberontakan, spionase, dan pelanggaran peraturan-peraturan militer Jepang. Lihat: Mardjono Reksodiputro, “Pembinaan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 25, no. 3 (1995): 195.

<sup>179</sup> Gunseikanbu, *Bokoe Pengoempoelan Oendang-Oendang: Diksoesoen Dengan Peroebahan Dan Tambahan Sampai Penghabisan Boelan 6, Tahoen Syoowa 19 (2604)*. *Loc.cit.*

memerlukan perubahan demi menunjang kepentingan pemerintah Jepang dan mempersiapkan masyarakat Asia Timur Raya bersatu.

Salah satu perubahan itu dapat dilihat dalam pasal tiga belas,<sup>180</sup> perubahan pertama pada pasal itu dapat terlihat dengan memberikan otoritas untuk *Gunseikan* untuk secara langsung dapat melarang pelanggar untuk menjual, menghentikan produksi penerbitan, dan terakhir *Gunseikan* dapat memberikan perintah untuk melakukan perampasan aset pelanggar dengan catatan mereka sudah melanggar pasal 13 ayat (1) dan (2). Otoritas ini merupakan salah satu perubahan yang dapat dilihat secara langsung. Setidaknya pada peraturan sebelumnya tidak menyebutkan wewenang atau otoritas langsung *Gunseikan* terhadap pelanggar undang-undang ini.

Disamping itu peraturan undang-undang (*Osamu Seirei*) dengan jelas menguraikan klasifikasi pelanggar dan hukumannya. Meskipun pada peraturan sebelumnya juga menyebutkan hukumannya, tetapi jenis pelanggarannya tidak disebutkan dengan jelas, dan hanya menyebutkan adanya pengadilan bagi para pelanggar. Setidaknya terdapat tiga klasifikasi yang diatur dalam hukum menurut *Osamu Seirei* No. 6 Tahun 2604, yaitu pertama kategori pidana berat, pidana menengah dan pidana ringan.

---

<sup>180</sup> Bunyi Pasal 13, ayat (1) *Gunseikan* boleh melarang mendjoeal atau menjiarkan penerbitan, apabila penerbit atau pentjetaknya melanggar oendang-oendang ini. Ayat (2) *Gunsseikan* boleh melarang atau menghentikan penerbitan soerat kabar, apabila penerbit, penjoesoen atau pentjetaknya melanggar oendang-oendang ini. Ayat (3) Dalam hal pelanggaran kedoea ajat diatas itoe, maka *Gunseikan* boleh memberi perintah untuk membeslag atau merampas penerbitan atau soerat kabar itoe. Lihat: Ibid.

Kategori pidana berat setidaknya disebutkan pada pasal empat belas.<sup>181</sup> Hukuman tertinggi atau pidana berat yang disebutkan dalam pasal 14 ayat 1 adalah pelanggaran yang melanggar pasal 1 ayat 1 berisi tentang media massa yang dapat menghalangi usaha peperangan pemerintah militer Jepang, termasuk melakukan penyebaran informasi, pengiringan opini, dan aksi spionase. Ditambah dengan yang berkaitan langsung pada usaha-usaha media massa yang dapat mengganggu ketertiban, dan keamanan pemerintahan militer Jepang.

Adapun hukuman yang diberikan berupa hukuman mati, atau hukuman penjara (*tyoo-eki*) seumur hidup, atau dengan hukuman denda (*bakkin*) paling banyak f. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan pada pasal 14 ayat 2 menyebutkan pidana menengah dengan pelanggaran yang melanggar pasal 1 ayat 2, berisi mengenai media massa yang melanggar norma-norma kesopanan dan mengganggu ketertiban umum. Besar hukuman yang diberikan pada pelanggar berupa hukuman penjara (*tyoo-eki*) paling lama tiga tahun, atau dengan hukuman denda (*bakkin*) paling banyak f. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hukuman pidana menengah juga dapat dilihat pada pasal lima belas.<sup>182</sup> Pidana menengah menurut pasal ini adalah pertama pelanggar yang melanggar

---

<sup>181</sup> Bunyi Pasal 14, ayat (1) *Barang siapa mengoemoemkan soerat-soerat, gambar-gambar atau loekisan-loekisan, berlawanan dengan pasal 1 ayat 1, dihoekoem mati, atau dihoekoem pendjara seoemoer hidoep atau dihoekoem dengan hukum dengan tyoo-eki (hoekoeman pendjara) jang batas lamanja, ataupun dihoekoem dengan bakkin (hoekoeman denda) paling banjak f 50.000 (lima puluh ribu roepiah). Ayat (2) Barang siapa mengoemoemkan soerat-soerat, gambar-gambar atau loekisan-loekisan, berlawanan dengan pasal 1 ayat 2, dihoekoem dengan tyoo-eki (hoekoeman pendjara) paling lama tiga tahoen, atau dihoekoem dengan bakkin (hoekoeman denda) paling banjak f 5.000,- (lima ribu roepiah). Lihat: Ibid.*

<sup>182</sup> Bunyi Pasal 15, “*Barang siapa menerbitkan penebitan atau soerat kabar atau memboeat pilem, atau memperbanjaknja, berlawanan dengan pasal 3 ayat 1, pasal 4 atau pasal 8, dihoekoem dengan tyoo-eki (hoekoeman pendjara) paling lama 2 tahoen, atau bakkin (hoekoeman denda) paling banjak f 2.000,- (dua ribu roepiah).*” Lihat: Ibid.

pasal 3 ayat 1 yang berisi tentang penyensoran isi media massa yang harus diserahkan pada *Gun-ken-etsu* (unit penyensor) pemerintah militer Jepang. Kedua pelanggar pasal 4 berupa penyampaian surat permohonan yang akan menerbitkan surat kabar. Ketiga pelanggar pasal 8 berupa surat permohonan pembuatan film (penyensoran naskah) yang harus diserahkan pada *Gun-ken-etsu* (unit penyensor) pemerintah militer Jepang. Besar hukuman dari pidana menengah ini berupa hukuman penjara (*tyoo-eki*) paling lama dua tahun, atau dengan hukuman denda (*bakkin*) paling banyak f. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terakhir mengenai hukuman pidana ringan yang dapat dilihat pada pasal 16 ayat 2, 3, 4, dan 6.<sup>183</sup> Hukuman pidana ringan menurut pasal ini adalah, pertama penerbit dan penyusun yang melanggar pasal 5 atau berisi tentang segala hal penerbitan harus dilaporkan pada *Gun-ken-etsu* (unit penyensor) sebelum dimuat dalam surat kabar. Kedua penerbit surat kabar yang melanggar pasal 6 ayat (2), berisi tentang aturan identitas pada halaman pertama yang telah mendapat izin (lulus dari unit penyensor). Ketiga penerbit dan penyusun surat kabar yang melanggar pasal 7, berisi tentang sampling surat kabar atau media cetak atau contoh satu rangkap surat kabar yang diberikan kepada pemerintah militer (*Gunseikanbu*) dan *Gun-ken-etsu* (unit penyensor) sebelum diedarkan. Keempat penerbit surat

---

<sup>183</sup> Bunyi Pasal 16 yang berkaitan langsung dengan pers dan penerbitan, "*Barang siapa termasuk dalam satoe nomor jang tersebut dibawah ini, dihoekoem pendjara paling lama 1 tahoen atau dihoekoem denda paling banjak f 1.000,- (seriboe roepiah): ayat (2) Penerbit dan penjoesoen soerat kabar, jang melanggar pasal 5; ayat (3) Penerbit penerbitan atau penerbit dan penjoesoen soerat kabar, jang melanggar pasal 6; ayat (4) Penerbit atau orang jang memperbanjak penerbitan atau soerat kabar, jang melanggar pasal 7; ayat (6) Orang jang mengexport penerbitan, soerat kabar, atau pilem jang beloem diperiksa, berlawanan dengan pasal 10 ayat 1, atau orang jan mendjoeal atau menjiarkan penerbitan atau soerat kabar jang beloem diperiksa, berlawanan dengan pasal 10 ayat 2. Dengan aturan tambahan yaitu, Oendang-oendang ini moelai berlaku pada hari dioemoemkan.*" Lihat: Ibid.

kabar yang melanggar pasal 10 ayat (1) dan (2) berisi, tentang penyensoran surat kabar yang keluar dan masuk pulau Jawa. Besar hukuman dari pidana menengah ini berupa hukuman penjara (*tyoo-eki*) paling lama satu tahun, atau dengan hukuman denda (*bakkin*) paling banyak f. 1.000,- (seribu rupiah).

Pada Intinya adanya kebijakan pers pada masa pendudukan Jepang merupakan langkah untuk mengatur jalanya kehidupan pers dan penerangan agar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ditentukan, serta sejalan dengan tujuan pendudukan Jepang.

### **3.4 Profile Surat Kabar Asia Raya**

Pendudukan militer Jepang di Indonesia membawa konsep *total war*, sebuah konsep perang menggunakan keseluruhan sumber daya yang dimiliki negaranya. Salah satu prinsip dalam total war adalah mobilisasi massal dari segenap warga negara. Jepang berusaha melakukan mobilisasi secara keseluruhan dengan menggunakan langkah-langkah persuasif. Propaganda dalam hal ini merupakan salah satu langkah persuasif untuk mengambil hati rakyat Indonesia. Pasukan propaganda Jepang dikirim ke Indonesia yang dikomandoi oleh Letnan Kolonel Keiji Machida. Mereka terdiri atas 190 orang Jepang, termasuk *Aki Asano, Tomoji Abe, Uio Tomizawa, N. Shimizu, dan Tatsuo Ichiki*.<sup>184</sup> Mereka merupakan anggota Divisi Propaganda dengan tujuan kedatangannya ke Indonesia adalah untuk secara halus mengambil simpati masyarakat Indonesia agar mendukung perang Asia Timur Raya.

---

<sup>184</sup> Maman S. Mahayana, "Japanese Occupation Government Policy in Indonesia on Culture and Literature: A Case Study of Asia Raja Newspaper (1942-1945)," *Journal of Humaniora* Vol. 25, no. 2 (2013). Hlm. 131.

Pemerintah militer Jepang merasa perlu menerbitkan surat kabar lokal dengan bahasa Indonesia. Atas dasar itu, satu bulan kemudian mereka menerbitkan Surat Kabar Asia Raya di Jakarta. Surat kabar ini pertama kali terbit pada hari Rabu tanggal 29 April 1942, sekaligus menjadi surat kabar pertama yang terbit didaerah pendudukan militer Jepang di Jawa. Hari terbitnya surat kabar ini bertepatan langsung dengan kelahiran Kaisar Hirohito. Adapun staf yang bertugas dalam Asia Raya terdiri atas,<sup>185</sup>

Badan Pengarang	: A. Asano; N. Shimizu; O. Tomizawa
Pimpinan Administratif	: T. Kurozawa
Anggota Kehormatan	: R. Soekardjo Wirdjopranoto
Pimpinan Redaksi	: T. Ichiki <sup>186</sup>
Bagian Politik dan Oemoem	: Winarno
Bagian Sosial dan Pemoeda	: Mr. R. Samsuedin
Bagian Keboedjaan	: Sanoesi Pane
Bagian Ekonomi	: Setijoso
Pembantoe	: A. S. Alatas
Alamat Kantor	: Molenvliet Oost No. 8 Djakarta
Tiras	: 15.000 ekstemplar
Harga	: 10 Sen/ekstemplar

Harga Langganan 3 boelan f 4.50, boleh bajar boelanan f 1.50 ditambah dikirim dengan post 25 sen, harga iklan 40 sen sebaris, iklan dengan perjanjian dapat berdamai, etjeran selemba 10 sen.

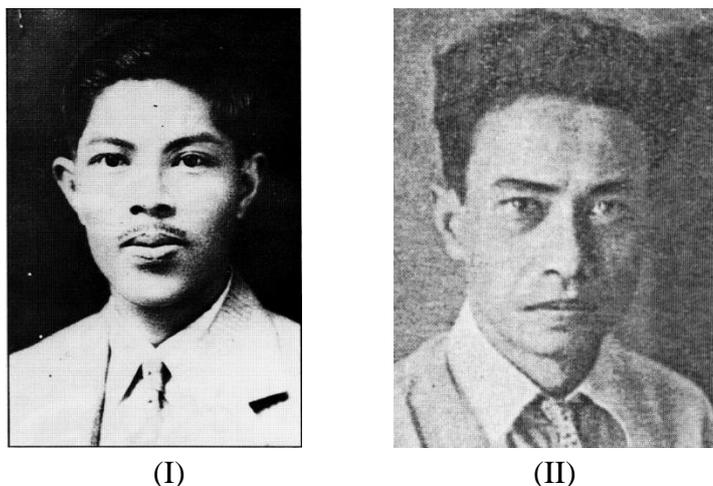
Staf dalam surat kabar Asia Raya bisa dilihat merupakan gabungan dari orang Jepang dan orang Indonesia, umumnya mereka merupakan jurnalis dan sastrawan yang memiliki pengalaman. Seperti T. Ichiki, dia merupakan jurnalis *Tōido Nippō* (Harian Hindia Timur) sebuah media massa Jepang di Hindia Timur.<sup>187</sup> Selain itu Sanoesi Pane juga merupakan salah satu jurnalis dari surat kabar China-Melayu

<sup>185</sup> Staff Asia Raya, "Header Asia Raya," *Asia Raya* (Djakarta, April 30, 2602)., hlm. 1.

<sup>186</sup> Tatsu Ichiki, adalah seorang jurnalis dan propaganda berkebangsaan Jepang. Ketika Jepang menyatakan kekalahan terhadap sekutu, Ichiki malah menjadi desertir, bukan sebagai T. Ichiki tapi sebagai Abdul Rahman pemuda yang memilih berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Lihat: Gotō, "Life and Death of 'Abdul Rachman' (1906-49): One Aspect of Japanese-Indonesia Relationships." p. 69.

<sup>187</sup> Dewi Yuliati, "Sistem Propaganda Jepang Di Jawa 1942-1945" (Semarang, 2010). hlm. 6.

*Kebangoenan*, surat kabar itu juga menjadi corong dari orang-orang Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia).<sup>188</sup> Kedua orang itu merupakan salah seorang yang memiliki pengalaman sebagai jurnalis, sehingga ketika Jepang mendarat di Jawa mereka berdua direkrut oleh pemerintah militer Jepang sebagai staf surat kabar Asia Raya.



Gambar 3.2 (I). *Tatsuo Ichiki*<sup>189</sup> (II). *Sanoesi Pane*<sup>190</sup>

Pada awal pendudukan Jepang surat kabar ini terbit setiap hari, namun menjelang bulan kedua pendudukan Jepang di Jawa, surat kabar ini mengalami perubahan berupa libur pada hari Minggu dan hari libur nasional. Kendati demikian waktu penerbitan juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi jalannya perang Asia Timur Raya, tidak jarang apabila informasi dirasa penting maka penerbitan akan dilaksanakan meskipun bertepatan dengan hari libur atau hari Minggu.

<sup>188</sup> Soebagijo Ilham Notodidjojo, *Sejarah Pers Di Indonesia*, ed. Nugroho Notosusanto (Djakarta: Dewan Pers, 1977)., hlm. 37.

<sup>189</sup> Foto Tatsuo Ichiki pada akhir tahun 1941. Lihat: Gotō, "Life and Death of 'Abdul Rachman' (1906-49): One Aspect of Japanese-Indonesia Relationships." *Op.cit*, p.69.

<sup>190</sup> Foto Sanoesi Pane pada tahun 1943. Lihat: Misbach Yusa Biran, *Peran Pemuda Dalam Kebangkitan Film Indonesia* (Jakarta: Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, 2009).

Salah satu contohnya adalah ketika peristiwa sidang pertama *Chuo Sang-In* yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Oktober 1943, hari selanjutnya pada 17 Oktober 1943 surat kabar Asia Raya tetap terbit memberitakan peristiwa penting itu.<sup>191</sup> Disamping itu pada peristiwa khusus seperti peristiwa Janji Koiso yang diumumkan pada hari Kamis, 7 September 1944, tiga hari setelahnya atau pada hari Minggu 10 September 1944,<sup>192</sup> surat kabar Asia Raya juga tetap terbit memberitakan berita yang menggembirakan itu.<sup>193</sup> Pemberitaan itu dirasa sangat penting bagi khalayak, oleh karena itu mereka tetap melakukan penerbitan kendati bertepatan dengan hari libur.

Konten atau isi dalam surat kabar Asia Raya sebenarnya hampir sama dengan surat kabar pada umumnya, yang biasanya memuat konten yang beragam seperti berita, opini, tajuk rencana, rubrik sastra dan iklan. Namun menjelang akhir Februari 1943, bagian iklan, dan sastra dikurangi, sejalan dengan keputusan pemerintah militer Jepang melalui *Djawa Shimbunkai*<sup>194</sup> yang memutuskan,

*Poetoesan "Djawa Sjinboen Kai"*

*Moelai tanggal 1 Maart (Maret) j.n.d. semoea s.k. di Djawa akan terbit 2 halaman tiap-tiap hari, tetapi seminggoe sekali diizinkan terbit 4 halaman, harga langganan saban boelan ditetapkan bagi "Asia Raja" f.1.50, bagi s.k. daerah f.1.30.*<sup>195</sup>

---

<sup>191</sup> Winarno, "Peristiwa Penting Dalam Oepatjara Pemboekaan Sidang Tjoeo Sangi-In Pertama," *Asia Raya* (Djakarta, Oktober 17, 2603)., hlm. 1

<sup>192</sup> Staff Asia Raya, "Soeasana Kegembiraan Melipoeti Seloeroeh Djakarta," *Asia Raya* (Djakarta, September 10, 2604)., hlm. 1.

<sup>193</sup> Peristiwa penting lain seperti, Hasil sidang Kedua *Chuo Sang-In* pada hari Minggu, 30 Januari 1944 tetap diberitakan, Hari jatuhnya Batavia pada hari Minggu, 05 Maret 1944, dan Hari Ulang Tahun *Tenno Heika* pada, 29 April 1944 juga tetap diberitakan. Lihat: *Asia Raya*, 30 Januari 2604; *Asia Raya*, 05 Maret 2604; *Asia Raya*, 29 April 2604.

<sup>194</sup> *Djawa Shimbun Kai* merupakan serikat persuratkabaran yang didirikan pada Desember 1942 dibawah pemerintahan militer Jepang di Jawa, dan dipimpin oleh Suzuki Bunshiro. Serikat ini bertugas untuk mengelola dan mengatur penerbitan surat kabar di Jawa. Lihat: Winda et al., *Kamus Sejarah Indonesia Jilid I: Nation Formation (1900-1950)*. hlm. 66.

<sup>195</sup> Kotoea Badan Pengoemoeman Djawa Sjinboen Kai, "*Poetoesan 'Djawa Sjinboen Kai,'*" *Asia Raya* (Djakarta, February 27, 2603)., hlm. 1.

Keputusan itu membatasi jumlah halaman pada setiap penerbitan surat kabar di Jawa, alasannya adalah kelangkaan kertas karena jalannya perang. Jepang juga beralasan bahwa kelangkaan ini terjadi di seluruh dunia, oleh karena itu surat kabar wajib untuk mengurangi penerbitannya.<sup>196</sup> Kendati demikian pemerintah militer Jepang juga berusaha untuk tidak mengurangi jumlah pegawai, dan hanya mengurangi harga langganan bulanan menjadi f.1.50. Pengurangan jumlah halaman dilaksanakan secara bertahap dan baru efektif dilakukan pada tanggal 8 Maret 1943.

Surat kabar Asia Raya juga terus berkembang dengan dinamis, salah satunya adalah header dari surat kabar ini dalam setiap tahun selalu mengalami perubahan. Kemungkinan dari perubahan ini adalah untuk membuat pembaca tidak bosan dengan desain koran yang itu-itu saja. Terlihat dengan header pada tahun 1942 yang merupakan transisi dan dengan jelas menuliskan staf gabungan yang terlibat dalam surat kabar Asia Raya. Setahun setelahnya, staf produksi hanya ditampilkan dari kalangan orang Indonesia saja.<sup>197</sup> Salah satu alasan staf redaksi yang ditampilkan terbatas orang Indonesia adalah agar memberikan persepsi pembaca surat kabar Asia Raya minim dari intervensi pihak Jepang, sehingga pembaca bisa lebih mudah menerima informasi yang diberikan surat kabar Asia Raya.

Perubahan lain dalam surat kabar Asia Raya adalah bentuk dukungan dari pihak surat kabar ini terhadap program romusha dan tentara pembela tanah air pasca awal tahun 1944. Bentuk dukungan itu adalah membebaskan 10 sen sebulan untuk Roomukyokai dan Tentara Pembela Tanah Air, seperti terlihat:

---

<sup>196</sup> Ibid.

<sup>197</sup> Staff Asia Raya, "Header Asia Raya," *Asia Raya* (Jakarta, February 20, 2603)., hlm. 1.

*Harga Advertesi f.1.50 sebaris  
 Harga langganan 3 boelan... f.4.50  
 Ditambah 10 sen seboelan oentoek  
 Roomukyokai dan  
 "Tentara Pembela Tanah Air"<sup>198</sup>*

Mengenai tema pemberitaan, dalam surat kabar Asia Raya ini memiliki sifat dinamis, mengikuti perkembangan informasi yang sedang hangat. Sehingga sifat aktual dan faktual dalam hal ini tidak ditinggalkan kendati surat kabar juga merupakan corong propaganda pemerintah militer Jepang di Indonesia. Namun, narasi dalam pemberitaan tetap digunakan untuk kepentingan Jepang dalam menarik simpati masyarakat dan dengan satu muara untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Selain itu dalam pemberitaan Asia Raya juga terdapat bagian penyensoran, sehingga berita yang ditampilkan pada surat kabar ini sudah sesuai dengan tujuan pemerintah militer Jepang.

Namun menjelang akhir pendudukan Jepang, narasi propaganda dan penyensoran pada pemberitaan dalam surat kabar Asia Raya mengalami sedikit kelonggaran karena adanya janji koiso. Bangsa Jepang mempercayai sepenuhnya keinginan Indonesia Merdeka, sehingga tema-tema perjuangan ini menjadi sedikit longgar pasca kebijakan itu. Kendati demikian hal-hal yang berkaitan dengan informasi perang masih dibatasi dan hanya informasi yang diizinkan terbit yang boleh beredar di surat kabar Asia Raya. Seperti pada hari Selasa, 14 Agustus 1945, muncul artikel dengan judul "*Sebelum djagoeng berboenga, Indonesia pasti Merdeka!*"<sup>199</sup> artikel tersebut seakan membakar semangat bahwa kemerdekaan

---

<sup>198</sup> Staff Asia Raya, "Header Asia Raya."

<sup>199</sup> Staff Asia Raya, "Sebelum Djagoeng Berboenga, Indonesia Pasti Merdeka!," *Asia Raya* (Jakarta, August 14, 2605). Hlm. 1.

Indonesia itu sudah didepan mata. Artikel itu sebenarnya menunjukkan adanya kelonggaran mengenai tema-tema perjuangan kemerdekaan. Bisa dikatakan menjelang akhir perang Indonesia sudah dijanjikan kemerdekaan, oleh karena itu artikel-artikel yang berkaitan dengan itu tidak mengalami penyensoran.

Demikian juga pada 18 Agustus 1945 sehari setelah kemerdekaan Indonesia Asia Raya turut menerbitkan beberapa artikel mengenai proklamasi kemerdekaan. Diantaranya, "*Pengangkatan Kepala Negara Indonesia Merdeka Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta*"<sup>200</sup> dengan ukuran tulisan besar mengisi halaman surat kabar Asia Raya. Kemudian rubrik sastra mengenai lagu Indonesia Raya dengan seruan untuk menyanyikannya juga turut lolos dari sensor dan berhasil diterbitkan. Kedua artikel itu dapat dijadikan indikasi menjelang akhir perang pemerintah Jepang melakukan berbagai cara untuk menarik hati penduduk Indonesia, dalam hal ini diberikan kemerdekaan merupakan salah satu dari cara tersebut. Sehingga menjelang akhir perang sudah terjalin kerja sama antara Indonesia dengan pemerintah militer Jepang, khususnya dalam bidang surat kabar dan penerbitan.

Sebaliknya pemberitaan mengenai bom atom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki belum diberitakan, hal ini juga menunjukkan bahwa badan sensor masih aktif. Berita mengenai bom atom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki baru diberitakan pada hari Jumat, 24 Agustus 1945 dengan judul artikel, "*Akibat Bom Atom! Di Hiroshima dan Nagasaki*."<sup>201</sup> Artikel itu membahas mengenai kerusakan dan korban jiwa akibat bom atom, serta memberikan informasi tidak diketahui

---

<sup>200</sup> Staff Asia Raya, "Pengangkatan Kepala Negara Indonesia Merdeka Ir. Soekarno Dan Drs. Moh. Hatta," *Asia Raya* (Jakarta, August 18, 2605). Hlm. 1.

<sup>201</sup> Staff Asia Raya, "Akibat Bom Atom! Di Hiroshima Dan Nagasaki," *Asia Raya* (Jakarta, August 21, 2605). Hlm. 1.

mengenai gejala yang semakin parah setelah beberapa hari (radiasi?). Sebenarnya pada hari Selasa, 21 Agustus 1945 juga sudah terbit sedikit informasi mengenai bom atom itu pada artikel "*Perang dan peri-kemanusiaan: Kecedjian akibatnja ledakan bom-lajar dan bom-atoom.*"<sup>202</sup> Pada artikel itu hanya membahas mengenai penggunaan bom atom dalam sudut pandang hak asasi manusia, selain itu menganggap tindakan Amerika Serikat dan sekutunya dalam menggunakan bom atom itu bertentangan dengan kemanusiaan.

Surat kabar Asia Raya pada akhirnya harus mengakhiri aktivitas penerbitannya, sejalan dengan kemerdekaan Indonesia yang telah tercapai. Tepatnya pada hari Jumat, 07 September 1945 sebuah judul artikel dengan jelas ditampilkan "*Asia Raya Minta Diri*"<sup>203</sup> yang secara resmi menghentikan operasionalnya. Staf redaksi merasa Asia Raya sebagai surat kabar bentukan Jepang merasa perlu diakhiri karena memiliki sifat dan corak sebagai alat propaganda pemerintahan militer di Jawa. Sejalan dengan paragraf pertama dalam artikel itu,

*"Asia Raya jang djoega mempoenjai sifat dan tjorak sebagai alat bagi pemerintah Bala Tentara, kini menghadapi kesoekaran jang sangat penting dalam melangsoengkan kewadjibannja. Inilah alasan jang memaksa kami mengachiri penerbitan Asia Raya."*<sup>204</sup>

Asia Raya telah terbit dari Rabu, 29-04-1942 sampai Jumat, 07-09-1945 atau sekitar 3 Tahun 4 Bulan. Asia Raya terbit dan menemani pemerintahan militer Jepang di Jawa sekaligus menjadi bagian dari propaganda Jepang di Indonesia.

---

<sup>202</sup> Staff Asia Raya, "Perang Dan Peri-Kemanusiaan: Kecedjian Akibatnja Ledakan Bom-Lajar Dan Bom-Atoom," *Asia Raya* (Djakarta, August 21, 2605). Hlm. 1.

<sup>203</sup> Staff Asia Raya, "Asia Raya Minta Diri," *Asia Raya* (Djakarta, September 7, 2605). Hlm. 1.

<sup>204</sup> Ibid.